



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA

BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN SIKKA



LAPORAN KINERJA
BAPELITBANG KABUPATEN SIKKA
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban formal pengguna anggaran sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006.

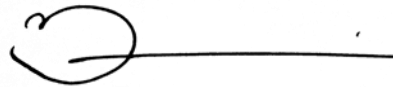
Tujuan penyusunan Laporan Kinerja ini untuk memberikan informasi tentang pencapaian tujuan dan sasaran Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka, realisasi indikator kinerja, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja, dan perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan Tahun 2023 dengan target kinerja 5 tahun yang direncanakan sesuai dokumen Perubahan Renstra Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023.

Laporan Kinerja ini disusun mengacu pada Peraturan Bupati Sikka Nomor 4 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sikka, Peraturan Bupati Sikka Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengumpulan dan Pengelolaan Data Kinerja Pemerintah Kabupaten Sikka dan Peraturan Bupati Sikka Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengukuran Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Sikka, Perubahan RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 yang diikuti dengan Perubahan Renstra Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023. Capaian kinerja yang termuat dalam laporan ini merupakan realisasi kinerja dari target-target kinerja yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Pada Tahun 2020 pemerintah Kabupaten Sikka melakukan penyusunan perubahan RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 yang diikuti dengan Perubahan Renstra Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023, dan pada Tahun 2022 menindaklanjuti Hasil Evaluasi Atas SAKIP Kabupaten Sikka Tahun 2022 yang dilakukan oleh Tim Evaluasi Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, maka dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada Permasalahan dan Isu-isu Strategis, Tujuan dan Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bapelitbang Kabupaten Sikka. Indikator Kinerja Utama disusun berorientasi hasil serta memenuhi kriteria terukur, relevan dan cukup untuk mengukur keberhasilan kinerja perangkat daerah.

Demikian laporan Kinerja Badan Perencanaan dan Litbang, semoga di tahun yang akan datang capaian kinerja Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka dapat semakin ditingkatkan sehingga semakin bermanfaat bagi perkembangan dan pembangunan daerah di Kabupaten Sikka.

Maumere, 18 Januari 2024
Kepala Badan Perencanaan dan Litbang Kab. Sikka,



Margaretha Movaldes Da Maga Bapa, S.T, M.Eng.

Pembina Tingkat I
NIP.19761206 200012 2 003

IKHTISAR EKSEKUTIF

Visi Kabupaten Sikka yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka tahun 2018-2023 adalah **"TERPENUHINYA HAK-HAK DASAR MASYARAKAT MENUJU SIKKA BAHAGIA 2023"**. Untuk mewujudkan Visi tersebut ditempuh melalui dua Misi Kabupaten Sikka, yaitu: (1) Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Berkualitas; (2) Mewujudkan Reformasi Birokrasi.

Dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Sikka ditetapkan 5 tujuan pembangunan dengan 9 indikator kinerja tujuan. Dalam mendukung perwujudan tujuan-tujuan tersebut, ditetapkan 10 sasaran pembangunan daerah dengan 20 indikator sasaran. Selanjutnya ditetapkan 8 strategi dan 29 arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah tersebut.

Dari hasil telaah terhadap Perubahan RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023, serta telaah terhadap tugas fungsi dan hasil perumusan isu-isu strategis Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka, maka tujuan yang akan dicapai Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka adalah Mewujudkan kualitas perencanaan yang baik dan terintegrasi dengan indikator tujuan **Persentase Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang**.

Berdasarkan Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 dan Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka tahun 2023 terdiri dari 1 tujuan dan 2 sasaran strategi dan 6 indikator kinerja tujuan dan sasaran, capaian kinerjanya adalah sebagai berikut:

- Tujuan 1 terdapat 2 sasaran strategi dan 6 indikator kinerja sasaran :
 - ✓ Capaian sasaran strategi (1), indikator kinerja (1) realisasi 88.50% atau **melampaui target 84.22%**.
 - ✓ Capaian sasaran strategi (1), indikator kinerja (2) realisasi 100% atau **mencapai target 100%**.
 - ✓ Capaian sasaran strategi (1), indikator kinerja (3) realisasi 97.52% atau **tidak mencapai target 100%**.
 - ✓ Capaian sasaran strategi (1), indikator kinerja (4) realisasi 94.21% atau **tidak mencapai target 100%**.
 - ✓ Capaian sasaran strategi (1), indikator kinerja (5) realisasi 100% atau **melampaui target 96%**.
 - ✓ Capaian sasaran strategi (2), indikator kinerja (6) realisasi 100% atau **mencapai target 100%**.

Hasil analisis pencapaian kinerja Tahun 2023 sesuai dengan perjanjian kinerja yang tertuang ke dalam dokumen Penetapan Kinerja menunjukkan bahwa secara umum Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka telah dapat melaksanakan

tugas dan fungsinya dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut.

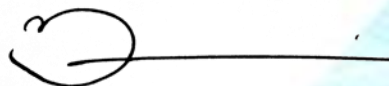
Tahun 2023 merupakan tahun terakhir perencanaan 5 tahunan, Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka dalam periode 5 tahun telah optimal melaksanakan tugas dan fungsi melalui pelaksanaan kegiatan dengan mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran yang selanjutnya diimplementasikan melalui program dan kegiatan strategis dengan dukungan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp.9,031,477,195,-** yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar **Rp.8,988,361,496,-** dan Belanja Modal sebesar **Rp43,115,699,-**.

Pada akhir Tahun Anggaran 2023, total realisasi Belanja Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka adalah sebesar **Rp8,405,708,989,-** atau **93,07%** yang terdiri dari realisasi Belanja Operasi sebesar **Rp8,362,593,290,-** atau **93,03%** dan realisasi Belanja Modal sebesar **Rp43,115,699,-** atau **100%**.

Dalam melaksanakan pencapaian tujuan maupun sasaran, Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka terdapat hambatan/kendala antara lain (1) Masih rendahnya kualitas pelayanan; (2) Masih rendahnya kapabilitas SDM perencana; dan (3) Masih rendahnya ketersediaan, validitas, pemanfaatan, pengelolaan dan pengintegrasian data berbasis Teknologi Informasi (TI). Sebagai upaya untuk mengatasi hambatan/kendala tersebut Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka mendorong aparatur Bapelitbang untuk mengikuti kegiatan Diklat dan Bimtek yang diselenggarakan secara daring oleh berbagai Lembaga Kementerian Pusat sejak tahun 2022 hingga sekarang serta menggalang Kerjasama dengan berbagai Lembaga NGO dan swasta serta Kementerian. Melalui upaya tersebut diharapkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat semakin meningkat.

Maumere, 18 Januari 2024

Kepala Badan Perencanaan dan Litbang Kab. Sikka,



Margaretha Movaldes Da Maga Bapa,ST, M.Eng.

Pembina Tingkat I

NIP.19761206 200012 2 003

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	viii
Bab I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Gambaran Umum Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka	1
1.2.1. Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka	1
1.2.2. Aspek Strategis Organisasi Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka	7
A) Sumber Daya Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka	7
B) Kondisi Sarana dan Prasarana	10
1.2.3. Struktur Organisasi Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka	11
1.3. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka	11
1.4. Sistematika Penulisan	12
Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	14
2.1. Rencana Strategis Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka	14
2.1.1. Visi	14
2.1.2. Misi	14
2.1.3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	15
2.1.4. Strategi dan Arah Kebijakan	16
2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka	19
2.2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka	19
2.2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	20
Bab III Akuntabilitas Kinerja	23
3.1. Capaian Kinerja Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka	23
3.1.1. Pengukuran Pencapaian Sasaran 1 Indikator (1), (2), (3), (4), dan (5)	28
3.1.2. Pengukuran Pencapaian Sasaran 2 Indikator (6)	32
3.1.3. Pengukuran Pencapaian Sasaran 1 (Indikator Penunjang)	34
3.1.4. Pengukuran Pencapaian Sasaran 2 (Indikator Penunjang)	35

3.1.5.	Pengukuran Pencapaian Sasaran 3 (Indikator Penunjang)	37
3.2.	Realisasi Anggaran Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka	43
3.2.1.	Pendapatan	43
3.2.2.	Belanja Pegawai	43
3.2.3.	Belanja Barang dan Jasa	44
3.2.4.	Belanja Modal	45
Bab IV	Penutup	47
4.1.	Kesimpulan	47
a.	Capaian Indikator Kinerja	47
b.	Realisasi Anggaran	47
4.2.	Saran dan Rekomendasi	48
Lampiran	50
1.	Perubahan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun 2023	51
2.	Perubahan Pohon Kinerja Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun 2023	52
3.	Perubahan Cascading Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun 2023	53
4.	Perubahan Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun 2023 (terlampir terpisah)	54
5.	Perubahan Rencana Aksi Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun 2023	55
6.	Pengukuran Capaian Kinerja Utama Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun 2023	61
7.	Realisasi Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun 2023	63
8.	Penghargaan-penghargaan Bapelitbang Kabupaten Sikka Tahun 2023..	69

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1	Status Kepegawaian Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka 8
Tabel 1.2	Tingkat Pendidikan ASN Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka 9
Tabel 1.3	Jenjang Pangkat/Golongan ASN Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka 9
Tabel 1.4	Jumlah Pegawai Menurut Golongan 10
Tabel 1.5	ASN Yang Sudah Mengikuti Diklat Kepemimpinan dan Yang Belum Mengikuti Diklat Kepemimpinan 10
Tabel 1.6	Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka 11
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka 16
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 20
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun 2023 21
Tabel 2.4	Program/Kegiatan dan Anggaran Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun 2023 21
Tabel 3.1	Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun 2023 23
Tabel 3.2	Perbandingan Pencapaian Kinerja pada sasaran Tahun 2021, 2022 dan capaian tahun 2023 24
	Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam Renstra :
Tabel 3.3	Capaian Kinerja Sasaran 1 Indikator (1), (2), (3), (4), dan (5) 29
Tabel 3.4	Capaian Anggaran Sasaran 1 Indikator (1), (2), (3), (4), dan (5) 30
Tabel 3.5	Capaian Kinerja Sasaran 2 Indikator (6) 32
Tabel 3.6	Capaian Anggaran Sasaran 2 Indikator (6) 33
Tabel 3.7	Capaian Kinerja Sasaran 1 (Indikator Penunjang) 35
Tabel 3.8	Capaian Anggaran Sasaran 1 (Indikator Penunjang) 35
Tabel 3.9	Capaian Kinerja Sasaran 2 (Indikator Penunjang) 36
Tabel 3.10	Capaian Kinerja Sasaran 3 (Indikator Penunjang) 37
Tabel 3.11	Capaian Anggaran Sasaran 3 (Indikator Penunjang) 37
Tabel 3.12	Efisiensi Sumber Daya Eselon II 39
Tabel 3.13	Efisiensi Sumber Daya Eselon III (Sekretaris) 40
Tabel 3.14	Efisiensi Sumber Daya Eselon III (Bidang PPEPD) 40
Tabel 3.15	Efisiensi Sumber Daya Eselon III (Bidang PPM) 41
Tabel 3.16	Efisiensi Sumber Daya Eselon III (Bidang PSDA) 41
Tabel 3.17	Efisiensi Sumber Daya Eselon III (Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan) 42
Tabel 3.18	Anggaran dan Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Badan Perencanaan dan Litbang Kab. Sikka TA. 2023 44

Tabel 3.19	Anggaran dan Realisasi Anggaran Belanja Barang dan Jasa Badan Perencanaan dan Litbang Kab. Sikka Tahun Anggaran 2023	44
Tabel 3.20	Anggaran dan Realisasi Anggaran Belanja Modal Badan Perencanaan dn Litbang Kab. Sikka Tahun Anggaran 2023	46

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. 1	Struktur Organisasi Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka 7
Gambar 3.1	capaian realisasi indikator kinerja Nilai SAKIP Bapelitbang Tahun 2021 – 2023 26
Gambar 3.2	Persentase Dokumen Perencanaan, Pelaporan, Evaluasi dan pengendalian Perangkat Daerah yang berkualitas 26
Gambar 3.3	capaian realisasi indikator kinerja Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD 26
Gambar 3.4	capaian realisasi indikator kinerja Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam APBD 27
Gambar 3.5	capaian realisasi indikator kinerja Persentase Peran Serta Masyarakat dalam Proses Perencanaan 27
Gambar 3.6	capaian realisasi indikator kinerja Persentase Hasil Kelitbangan sebagai Masukan Penyusunan Kebijakan 27
Gambar 3.7	capaian realisasi indikator kinerja Meningkatnya ketaatan Bapelitbang terhadap Perencanaan, Evaluasi dan Pengendalian 28
Gambar 3.8	capaian realisasi indikator kinerja Indeks Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan dan Litbang Kab. Sikka ... 28

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan daerah untuk melaksanakan pembangunan dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Pembangunan daerah yang dimaksud merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi.

Sebagai koordinator dalam perencanaan pembangunan daerah, Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka melaksanakan berbagai program dan kegiatan strategis sesuai tugas dan fungsi dibidang perencanaan dan penelitian dan pengembangan. Untuk itu Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka akan menyajikan informasi tentang pencapaian tujuan dan sasaran, realisasi indikator kinerja, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja Tahun 2021 dalam bentuk laporan pertanggungjawaban yang selanjutnya disebut Laporan Kinerja.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Tujuan penyusunan laporan kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

1.2. Gambaran Umum Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka

1.2.1. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka

Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan (Badan Perencanaan dan Litbang) Kabupaten Sikka merupakan unsur penunjang pemerintah daerah di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka dan Peraturan Bupati Sikka Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan

maka Susunan Organisasi Badan Perencanaan Litbang Kabupaten Sikka sebagai berikut :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Bidang Penelitian dan Pengembangan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. Unit Pelaksana Teknis Sikka Inovation Centre, terdiri dari :
 1. Kepala UPT; dan
 2. Sub Bagian Tata Usaha.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala UPT menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai tugas masing-masing.

Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan dan penelitian dan pengembangan;
2. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan dan penelitian dan pengembangan;
3. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan dan penelitian dan pengembangan;
4. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan penelitian dan pengembangan; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan administrasi dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, tata usaha, perlengkapan rumah tangga, urusan Aparatur Sipil Negara kepada semua unsur di lingkungan Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
2. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
3. pengelolaan perlengkapan urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik Negara;
4. pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang Perencanaan, Pendanaan, Pengendalian, Evaluasi, Data dan Pelaporan. Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. pelaksanaan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
2. pelaksanaan analisa dan pengkajian kewilayahan;
3. pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
4. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
5. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
6. pengoordinasian dan pengsinkronisasian pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran daerah;
7. pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
8. pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
9. pengidentifikasian permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
10. pengkajian dan pengamanan data informasi pembangunan daerah;
11. pelaksanaan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
12. penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
13. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
14. pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
15. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah; dan
16. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan perencanaan di bidang pemerintahan, Pendidikan dan Kebudayaan dan Kesejahteraan Sosial. Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah);
2. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
3. pengoordinasian Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
4. pengoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
5. pengoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. pengoordinasian Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi;
7. pengoordinasian Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten.
8. pengoordinasian Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional;
9. pengoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar Daerah;
10. pengoordinasian Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah;
11. pelaksanaan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai tugas bidang; dan
12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan merumuskan dan melaksanakan kebijakan bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Keuangan dan Penanaman Modal. Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah);
2. pengoordinasian penyusunan Rencana strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
3. pengoordinasian Pelaksanaan Musyawarah perencanaan pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
4. pengoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
5. pengoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 6. pengoordinasian Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi;
 7. pengoordinasian Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan K/L di Provinsi dan Kabupaten;
 8. pengoordinasian Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional;
 9. pengoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar Daerah;
 10. pengoordinasian Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah;
 11. pelaksanaan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai tugas bidang; dan
 12. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang Infrastruktur Pekerjaan Umum, Infrastruktur Perhubungan dan Permukiman, dan Kewilayahan. Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah);
2. pengoordinasian penyusunan Rencana strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
3. pengoordinasian Pelaksanaan Musyawarah perencanaan pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
4. pengoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
5. pengoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. pengoordinasian Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi;
7. pengoordinasian Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten.
8. pengoordinasian Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional;
9. pengoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar Daerah;
10. pengoordinasian Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah;
11. pengkajian, analisis, dan perumusan kebijakan kewilayahan dan konektivitas daerah;

12. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model kewilayahan dan konektivitas serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistik integratif untuk kewilayahan dan konektivitas;
13. pengkajian, pengoordinasian dan perumusan Rencana Tata Ruang Wilayah daerah; dan
14. pelaksanaan sinkronisasi kebijakan sektoral dan kewilayahan dalam penentuan lokasi prioritas di daerah;
15. pelaksanaan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai tugas bidang; dan
16. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang Sosial, Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan, Inovasi dan Teknologi. Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan Kabupaten;
2. penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan Kabupaten;
3. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan Kabupaten;
4. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah Kabupaten;
5. fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
6. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Kabupaten;
7. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan Kabupaten;
8. pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah Kabupaten; dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sikka Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sikka Inovation Centre pada Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka. UPT Sikka Inovation Centre dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka yang terdiri atas manajemen kekayaan intelektual, inkubasi dan alih teknologi. Dalam melaksanakan tugasnya, UPT Sikka Inovation Centre mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. penyusunan Rencana Kerja Tahunan, Kebutuhan Anggaran dan Perlengkapan guna disampaikan kepada Kepala Badan;
2. pelaksanaan monitoring, evaluasi serta pelaporan kepada Kepala Badan;
3. pelaksanaan pembinaan, pelatihan dan percepatan keberhasilan pengembangan bisnis bagi masyarakat;
4. pelaksanaan manajemen kekayaan intelektual yang meliputi perencanaan pengembangan dan perlindungan produk;

5. peningkatan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
6. pelaksanaan urusan ketatausahaan; dan
7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1.2.2. Aspek Strategis Organisasi

A) Sumber Daya Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka

Dalam mendukung pelaksanaan tugas organisasi jumlah sumber daya aparatur merupakan faktor yang sangat penting. Jumlah pegawai pada Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka berjumlah 54 (lima puluh empat) orang yang dapat dirinci berdasarkan status kepegawaian dan jenis kelamin sebagai berikut :

Tabel 1.1.
Status Kepegawaian Badan Perencanaan dan Litbang
Kabupaten Sikka

No	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	ASN	20	17	37
2.	PPPK	1	1	2
3.	Honor	11	4	15
	Jumlah	32	22	54

Sumber : Olahan Bapelitbang Kabupaten Sikka, 2023

Dari data tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa 68,52% pegawai Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka berstatus PNS, 3,70% adalah Pegawai PPPK dan 27,78% adalah tenaga honor. Dari 15 tenaga honor tersebut 1 orang tenaga ahli yang menangani urusan sistem informasi dan teknologi dan 7 orang honorer yang ditempatkan untuk pelayanan administrasi pada kantor Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka dan 7 orang tenaga honor ditempatkan pada Unit Pelaksana Teknis Sikka Inovation Centre (SIC). Jika diperhatikan dari komposisi jenis kelamin, sebanyak 59,26% adalah laki-laki dan 40,74% adalah perempuan.

Sumber daya aparatur sebagai faktor terpenting dalam organisasi pemerintahan daerah harus terus ditingkatkan agar dapat berkinerja secara optimal. Didasari bahwa peranan aparatur pemerintah sangat menentukan keberhasilan organisasi pemerintah daerah dalam pengembangan misinya maka, pengembangan sumber daya aparatur pemerintah daerah harus diarahkan pada terciptanya aparatur pemerintah yang mampu bersaing dalam era globalisasi. Untuk tahun 2023 terdapat sejumlah Aparatur Negeri Sipil Bapelitbang Kab. Sikka telah mengikuti berbagai Bimtek dan pelatihan yang dilaksanakan secara daring berbagai Lembaga pemerintahan baik tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Pusat

yang diharapkan akan membantu meningkatkan kualitas hasil pelaksanaan tugas di bidang tugasnya masing-masing.

Klasifikasi ASN (PNS dan PPPK) berdasarkan tingkat pendidikan dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 1.2.
Tingkat Pendidikan ASN Badan Perencanaan dan Litbang
Kabupaten Sikka

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1.	SMA	3
2.	DIII	2
3.	DIV	1
4.	S1	25
5.	S2	8
	Jumlah	39

Sumber : Olahan Bapelitbang Kabupaten Sikka, 2023

Dari data tersebut diatas 12.82% ASN Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka adalah berpendidikan Strata Dua (S-2), diikuti 64.10% berpendidikan Strata Satu (S-1), 2.56% berpendidikan Diploma IV, 5.13% berpendidikan Diploma III, dan 7.69% berpendidikan SMA.

Pegawai negeri sipil memiliki golongan dan pangkat masing-masing secara berkala dan berjenjang. ASN Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka berdasarkan pangkat dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 1.3.
Jenjang Pangkat/Golongan ASN Badan Perencanaan dan Litbang
Kabupaten Sikka

No	Pangkat/Golongan	Jumlah
1.	Pembina Utama/IV e	-
2.	Pembina Utama Madya/IV d	-
3.	Pembina Utama Muda/IV c	-
4.	Pembina Tingkat I/IV b	2
5.	Pembina/IV a	6
6.	Penata Tingkat I/III d	10
7.	Penata/III c	7
8.	Penata Muda Tingkat I/III b	6
9.	Penata Muda/III a	2
10.	Pengatur Tingkat I /II d	2
11.	Pengatur/II c	2
12.	Pengatur Muda Tingkat I/II b	-
13.	Pengatur Muda/II a	-
14.	PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)	2
	Jumlah	39

Sumber : Olahan Bapelitbang Kabupaten Sikka, 2023

Dari data tersebut di atas menunjukkan bahwa 5,4% ASN Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka memiliki Pangkat Pembina Tingkat I/IVb, diikuti 16,22% memiliki pangkat Pembina/IVa, 27,03% memiliki pangkat Penata Tingkat I/IIIId, 18,92% memiliki Pangkat Penata/IIIc, 16,22% memiliki Pangkat Penata Muda Tingkat I/IIIb, 5,41% memiliki Pangkat Penata Muda/IIIa, 5,41% ASN Pengatur Tingkat I/IIId selanjutnya terdapat 5,41% memiliki Pangkat Pengatur/Iic.

Jika digambarkan sebaran ASN pada Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka menurut golongan, adalah sebagai berikut :

Tabel 1.4
Jumlah Pegawai Menurut Golongan

No	Uraian	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Kepala	-	-	-	1	1
2	Sekretariat	-	3	4	1	8
3	Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	-	-	4	1	5
4	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	-	4	1	5
5	Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	-	-	4	1	5
6	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-	-	4	1	5
7	Bidang Penelitian dan Pengembangan	-	-	3	2	5
8	UPT Sikka Inovation Centre (SIC)	-	1	2	-	3
9	PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)	-	-	-	-	2
	Jumlah					39

Sumber: Hasil Olahan Bapelitbang Kabupaten Sikka 2023

Pendidikan penjenjangan adalah sebuah prasyarat dalam peningkatan karier ASN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada beberapa jenjang pendidikan dan pelatihan ASN berdasarkan eselonering ASN. ASN yang telah mengikuti Diklat Penjenjangan sebagai berikut :

Tabel 1.5.
ASN Yang Sudah Mengikuti Diklat Kepemimpinan dan Yang Belum Mengikuti Diklat Kepemimpinan

No	Uraian	Jumlah ASN Yang Sudah Mengikuti Diklat Kepemimpinan	Jumlah ASN Yang Belum Mengikuti Diklat Kepemimpinan
1.	PIM II	-	2
2.	PIM III	2	4
3.	PIM IV	10	2
	Jumlah	12	8

Sumber : Olahan Bapelitbang Kabupaten Sikka, 2023

Dari data tersebut diatas sebanyak 2 orang ASN Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka telah mengikuti Diklat PIM III dan 10 orang telah

mengikuti Diklat PIM IV, sementara yang belum mengikuti Diklat PIM II sebanyak 2 orang, Diklat PIM III 4 orang dan Diklat PIM IV sebanyak 8 orang.

B) Kondisi Sarana dan Prasarana

Dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka memiliki sarana dan prasarana kerja yang digunakan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.6.
Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka

No.	Uraian	Jumlah
1	Ruang Kerja	12 Ruang
2	Ruang Rapat	2 Ruang
3	Ruang Produksi	2 Ruang
4	Mesin Produksi	28 Unit
5	Kendaraan Roda 4	2 Unit
6	Kendaraan Roda 2	16 Unit
7	Speedboat	1 Unit
8	Televisi	2 Unit
9	AC	33 Unit
10	Komputer PC	4 Unit
11	Printer	15 Unit
12	LCD Proyektor	8 Unit
13	Laptop	30 Unit
14	Plotter	1 Unit
15	GPS	5 Unit
16	Kamera	1 Unit
17	Handycam	1 Unit
18	Mesin Potong Rumput	1 Unit
19	Mesin Generator	1 Unit
20	Brankas	1 Unit
21	Microphone (Wireless Mic, floor stand, table stand)	11 unit
22	Soundsystem	1 paket
23	Lemari Es/freezer	6 unit
24	Telephone Mobile Intercome	11 unit
25	Wireless Behringer Europort MPA40BT-Pro All-In-One Portable	1 unit
26	Gimbal Stabilizer Camera	1 unit

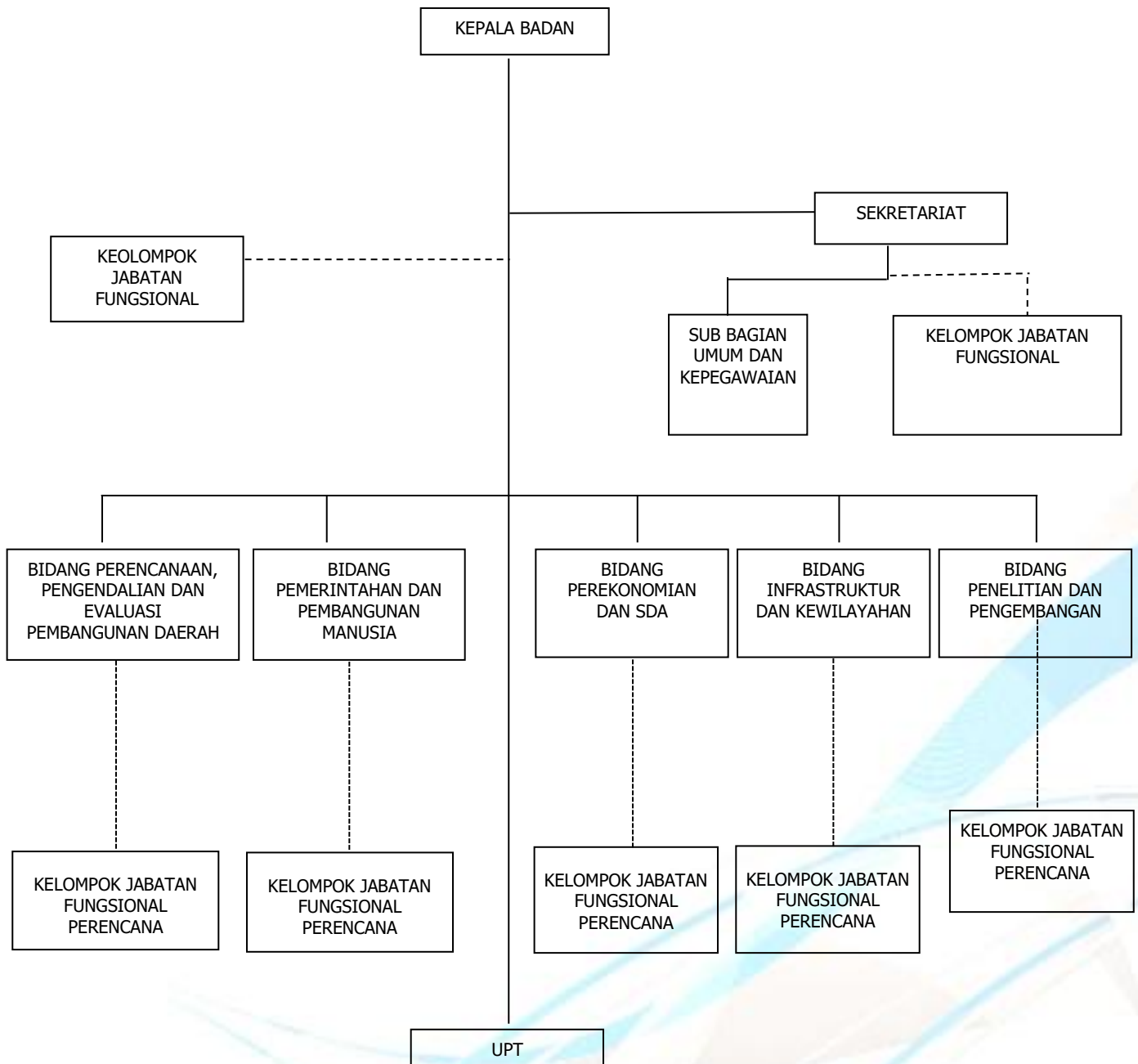
Sumber : Olahan Bapelitbang Kabupaten Sikka, 2023

Dari data tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa dalam mendukung pelaksanaan pelayanan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka sampai dengan saat ini memiliki 1 kompleks perkantoran dan 2 unit pengelola produksi. Ruang kerja Kantor Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka yang berada dalam satu kompleks tersebut merupakan gedung lama dan bangunan pasca gempa bumi. Hasil kajian Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka menyebutkan bahwa Indeks Kualitas Sarana dan Prasarana Bangunan Perkantoran Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka sebesar 0,54. Ini menunjukkan bahwa kualitas sarana dan prasarana

bangunan Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka yang ada sesuai dengan jumlah dan jenis kualifikasi namun belum memadai.

1.2.3. Struktur Organisasi Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sikka

Peraturan Bupati Sikka Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sikka maka Struktur Organisasi Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka sebagai berikut :



1.3. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka memiliki faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut untuk dapat mencari alternatif-alternatif yang terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada.

1. Kekuatan :
Ada beberapa faktor pendukung yang dinilai sebagai kekuatan dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - a. Tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya;
 - b. Adanya komitmen;
 - c. Adanya anggaran.
2. Kelemahan :
Ada beberapa faktor penghambat yang dinilai sebagai kelemahan dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - a. Jumlah pegawai yang masih kurang;
 - b. Masih
 - c. rendahnya kualitas pelayanan;
 - d. Masih rendahnya kapasitas dan kapabilitas SDM perencana;
 - e. Masih rendahnya ketersediaan, validitas, pemanfaatan, pengelolaan dan pengintegrasian data berbasis Teknologi Informasi (TI);
3. Tantangan :
Ada beberapa faktor penghambat yang dinilai sebagai tantangan dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - a. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan dari tingkat basis;
 - b. Ego sektor;
 - c. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap jaminan realisasi rencana;
 - d. Meningkatnya kebutuhan masyarakat yang sangat beragam dan kompleks.
4. Peluang :
Ada beberapa faktor pendukung yang diharapkan jadi peluang dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - a. Adanya regulasi yang mendukung pelaksanaan tugas;
 - b. Adanya peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan;
 - c. Semakin tingginya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang dapat mendukung kelancaran proses perencanaan pembangunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun 2023 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dijabarkan penjelasan umum organisasi Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka, dengan penekanan kepada aspek strategis serta permasalahan utama yang sedang dihadapi Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka. Sub bahasan mencakup Latar Belakang Penyusunan, Gambaran Umum, Permasalahan Utama serta Sistematika Penulisan.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

Bab ini menjelaskan tentang Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menjelaskan tentang Capaian Kinerja, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menjelaskan menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun 2023 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Badan Perencanaan dan Litbang Kab. Sikka

2.1.1. Visi

Visi adalah pernyataan cita-cita atau impian akan sebuah kondisi yang ingin dicapai di masa depan. Kondisi yang diinginkan adalah kondisi akhir periode yang harus dapat diukur pencapaiannya melalui berbagai usaha pembangunan. Usaha pembangunan yang dilakukan pada umumnya bertujuan untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat Kabupaten Sikka melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat menuju kehidupan yang bahagia.

Berdasarkan gambaran umum dan kondisi masyarakat Kabupaten Sikka serta mengacu pada RPJP Kabupaten Sikka Tahun 2005-2025 sebagai landasan idiil dan filosofis pembangunan sektoral, lintas sektoral dan kewilayahan yang dinamis dan berkesinambungan, maka ditetapkan Visi Pembangunan Kabupaten Sikka yang akan dicapai selama lima tahun mendatang (2018-2023), adalah terwujudnya:

"TERPENUHINYA HAK-HAK DASAR MASYARAKAT MENUJU SIKKA BAHAGIA 2023".

Formulasi visi di atas tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Pemenuhan Hak-hak Dasar;
Pemenuhan hak dasar adalah upaya untuk memenuhi hak pokok yang dibawa oleh manusia sejak lahir yang secara kodrat melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu gugat yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang meliputi : Hak atas pendidikan, Hak atas kesehatan, Hak perempuan dan anak, Hak atas kependudukan, Hak atas pekerjaan, Hak atas perumahan, Hak atas lingkungan yang berkelanjutan.
2. Bahagia
Bahagia adalah keadaan atau perasaan senang dan tentram dari masyarakat Sikka karena terpenuhinya aspek kesehatan, pendidikan, pekerjaan, pendapatan rumah tangga, keharmonisan keluarga, ketersediaan waktu luang, hubungan sosial, kondisi rumah dan aset, keadaan lingkungan dan kondisi keamanan.

2.1.2. Misi

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam upaya mewujudkan Visi. Untuk mencapai visi ditetapkan misi sebagai upaya untuk memperjelas arah atau langkah dengan mempertimbangkan lingkungan strategis. Misi harus mengacu pada masalah pokok daerah. Selain itu, Misi memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan.

Misi Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 adalah :

1. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Berkualitas
2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi

Untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan program pembangunan daerah selama lima tahun ke depan agar sinergis antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat maka Visi RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 tidak terlepas dari Visi Jangka Panjang Kabupaten Sikka yang termuat dalam RPJPD Kabupaten Sikka Tahun 2005-2025 dan RPJMD yang disusun mengacu pada Visi Misi RPJMD Provinsi NTT dan RPJMN.

2.1.3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Perumusan tujuan dan sasaran Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka dilakukan dengan mengacu pada tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan pembangunan sebagaimana tercantum dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023, agar dapat memperjelas dan menunjukkan keselarasannya dengan upaya pencapaian visi dan misi Kabupaten Sikka. Penetapan tujuan dan sasaran juga merupakan respon dan jawaban atas hasil perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka.

Dari hasil telaah terhadap Perubahan RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023, serta telaah terhadap tugas fungsi dan hasil perumusan isu-isu strategis Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka, yang kemudian telah disempurnakan Kembali melalui Keputusan Kepala Bapelitbang Kab. Sikka Nomor Bapelitbang.050/26/ VIII/Tahun 2022 tanggal 24 Agustus 2022 tentang Perubahan Substansi Pada Renstra Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 maka tujuan yang akan dicapai Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka, yaitu :

1. Mewujudkan kualitas perencanaan yang baik dan terintegrasi.

Tujuan Mewujudkan kualitas perencanaan yang baik dan terintegrasi dengan Indikator Persentase Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang.

Selanjutnya untuk mewujudkan tujuan dari Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka tersebut, perlu dijabarkan dalam bentuk sasaran-sasaran yang akan dicapai dalam rumusan yang lebih spesifik, dan dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan.

Untuk pencapaian tujuan Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka, maka ditetapkan sasaran Perubahan Renstra Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023, yaitu :

1. Meningkatnya akuntabilitas perencanaan dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Sasaran Meningkatnya akuntabilitas perencanaan dan akuntabilitas kinerja birokrasi dengan Indikator Nilai SAKIP, Persentase Dokumen Perencanaan, Pelaporan, Evaluasi dan Pengendalian Perangkat Daerah yang berkualitas

(waktu, kesesuaian dengan tema dan target pembangunan), Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPd, Indikator Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPd kedalam APBD, Persentase Partisipasi Masyarakat dalam proses perencanaan.

2. Meningkatnya kualitas hasil kajian kelitbang.

Sasaran Meningkatnya kualitas hasil kajian Kelitbang dengan Indikator Persentase Hasil Kelitbang dalam Penyusunan Kebijakan daerah.

Dari tujuan dan sasaran beserta indikatornya tersebut di atas, selanjutnya ditetapkan target tujuan dan sasaran dalam kurun waktu tahun 2018-2023 sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun -				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Mewujudkan kualitas perencanaan yang baik dan terintegrasi	1. Meningkatnya akuntabilitas perencanaan dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Nilai SAKIP	68,46	72,71	76,96	80	84,22
			Persentase Dokumen Perencanaan, Pelaporan, Evaluasi dan Pengendalian Perangkat Daerah yang berkualitas (waktu, kesesuaian dengan tema dan target pembangunan)	92,00	100	100	100	100
			Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPd	97,30	98,80	99,80	99,85	100
			Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPd Kedalam APBD	93,18	95,18	97,68	99,68	100
			Persentase Partisipasi Masyarakat dalam proses perencanaan	88	90	92	94	96
		2. Meningkatnya kualitas hasil kajian kelitbang	Persentase Hasil Kelitbang dalam Penyusunan Kebijakan daerah	100	100	100	100	100

Sumber : Olahan Bapelitbang Kabupaten Sikka, 2023

2.1.4. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan dalam Perubahan Renstra Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023. Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka serta dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan.

Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka. Dengan mengetahui faktor-faktor yang

mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional.

Dalam upaya pencapaian sasaran tersebut, kemudian dirumuskan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Peningkatan koordinasi dan integrasi dalam penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian terhadap perencanaan.

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi Peningkatan koordinasi dan integrasi dalam penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian terhadap perencanaan adalah dengan merumuskan arah kebijakan, yaitu Peningkatan pengendalian, penyatuan dan upaya keterkaitan dalam penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian terhadap perencanaan dan Peningkatan keterpaduan, sinkronisasi dalam penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian terhadap perencanaan Penyediaan data yang valid dan reliabel dan Optimalisasi pola perencanaan yang efektif, efisien, partisipatif dan transparan berbasis teknologi informasi. Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, melalui Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan dan kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah serta Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah melalui kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam), Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan serta Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah melalui kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

2. Pengoptimalisasian dokumen perencanaan yang dihasilkan.

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi Pengoptimalisasian dokumen perencanaan yang dihasilkan adalah dengan merumuskan arah kebijakan yaitu Peningkatan keterpaduan dan sinkronisasi dalam penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian terhadap perencanaan serta Penyediaan data yang valid dan reliabel. Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan dan Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah melalui kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam), Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan serta Program Penunjang

Urusan Pemerintahan Daerah melalui kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

3. Peningkatan perencanaan partisipatif yang responsif.

Upaya yang dilakukan dalam mewujudkan strategi Peningkatan perencanaan partisipatif yang responsif adalah dengan merumuskan arah kebijakan yaitu Optimalisasi pola perencanaan yang efektif, efisien, partisipatif dan transparan berbasis teknologi informasi. Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan.

4. Peningkatan ketaatan Perangkat Daerah terhadap jadwal pelaksanaan kegiatan evaluasi, pengendalian dan pelaporan.

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi Peningkatan ketaatan PD terhadap jadwal pelaksanaan kegiatan evaluasi, pengendalian dan pelaporan adalah dengan merumuskan arah kebijakan yaitu Peningkatan Kualitas SDM perangkat daerah dan Optimalisasi SOP pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah. Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan dan Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah melalui kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam), Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan serta Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah melalui kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

5. Peningkatan hasil kelitbangan sebagai dasar masukan perumusan kebijakan pembangunan daerah.

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi Peningkatan hasil kelitbangan sebagai dasar masukan perumusan kebijakan pembangunan daerah adalah dengan merumuskan arah kebijakan yaitu Peningkatan Kajian Penelitian yang dihasilkan Peningkatan SDM dan kerjasama pelaku Kelitbangan dan Pendidikan dan Pelaksanaan Pelatihan ASN yang bergerak di bidang Kelitbangan. Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Penelitian dan Pengembangan Daerah, Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan dan Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi.

6. Peningkatan profesionalitas ASN.

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi Peningkatan profesionalitas ASN adalah dengan merumuskan arah kebijakan yaitu Peningkatan Keterampilan Dasar, Sosial dan Mental ASN. Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

7. Peningkatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja.

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi Peningkatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja adalah dengan merumuskan arah kebijakan yaitu Peningkatan Perlengkapan/Peralatan perabot, interior dan tata ruang kantor. Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka

2.2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan dan Litbang Kab. Sikka

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban. Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 ditetapkan sebagai dasar penilaian dalam pengukuran dan peningkatan akuntabilitas kinerja Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka pada Tahun 2023.

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang tercantum dalam Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023, ditetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 yang merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang mana Indikator Utama Bapelitbang Kabupaten Sikka ini. Indikator Utama Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka sebagaimana terakhir telah dievaluasi oleh Kementerian PANRB serta dikukuhkan melalui Peraturan Bupati Sikka Nomor 50 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sikka Nomor 43 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023 dan disempurnakan melalui Keputusan Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan nomor Bapelitbang.050/25/VIII/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Nomor Bapelitbang.050/21/VIII/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2019-2023 sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2.
Indikator Kinerja Utama
Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode Renstra	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	Nilai SAKIP	68,46	68,46	72,71	76,96	80	84,22	84,22
2	Persentase Dokumen Perencanaan, Pelaporan, Evaluasi dan Pengendalian Perangkat Daerah yang berkualitas (waktu, kesesuaian dengan tema dan target pembangunan)	92,00	92,00	100	100	100	100	100
3	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPd	97,30	97,30	98,80	99,80	99,85	100	100
4	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPd Kedalam APBD	93,18	93,18	95,18	97,68	99,68	100	100
5	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam proses perencanaan	88	88	90	92	94	96	96
6	Persentase Hasil Kelitbangan dalam Penyusunan Kebijakan daerah	100	100	100	100	100	100	100

2.2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati Sikka kepada Kepala Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka serta dari Kepala Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka kepada pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian kinerja disusun dengan memperhatikan Dokumen Pelaksanaan Anggaran serta dengan mencantumkan Indikator Kinerja dan Target Kinerja. Adapun indikator kinerja sasaran strategis yang termuat dalam Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3.

Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya akuntabilitas perencanaan dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Nilai SAKIP	Nilai	84,22
		Persentase Dokumen Perencanaan, Pelaporan, Evaluasi dan Pengendalian Perangkat Daerah yang berkualitas (waktu, kesesuaian dengan tema dan target pembangunan)	persen	100
		Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD	persen	100
		Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam APBD	persen	100
		Persentase Partisipasi Masyarakat dalam proses perencanaan	persen	96
2.	Meningkatnya kualitas hasil kajian kelitbangan	Persentase Hasil Kelitbangan dalam Penyusunan Kebijakan daerah	persen	100

Tabel 2.4.

Program/Kegiatan dan Anggaran
Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun 2023

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp4.333.810.299,-	APBD
	a) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp14.998.800,-	APBD
	b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp2.948.089.096,-	APBD
	c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp148.881.000,-	APBD
	d) Administarasi Umum Perangkat Daerah	Rp235.439.050,-	APBD
	e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.40.815.699,-	APBD
	f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp757.608.663,-	APBD
	g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp187.977.991,-	APBD
2.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp1.617.773.620,-	APBD
	a) Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Rp1.073.188.500,-	APBD
	b) Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp115.677.320,-	APBD
	c) Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp428.907.800,-	APBD

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
3.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp977.703.700,-	APBD
	a) Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Rp388.579.900,-	APBD
	b) Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Rp296.812.900,-	APBD
	c) Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Rp292.310.900,-	APBD
4.	Program Penelitian dan Pengembangan	Rp2.102.189.576,-	APBD
	a) Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Rp963.719.000,-	APBD
	b) Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Rp150.000.000,-	APBD
	c) Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Rp.500.000.000,-	APBD
	d) Pengembangan Teknologi dan Inovasi	Rp488.470.576,-	APBD

Sumber : Olahan Bapelitbang Kabupaten Sikka, 2023

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

3.1. Capaian Kinerja Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka

Akuntabilitas kinerja merupakan pengukuran tingkat capaian kinerja yang diperoleh berdasarkan perbandingan antara target dengan realisasi yang berhasil dicapai dalam jangka waktu satu tahun anggaran. Capaian kinerja Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka 2023 dapat diperoleh dengan membandingkan antara realisasi yang dicapai dengan target sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perubahan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun 2023 dalam Perjanjian Kinerja Kepala Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka dengan Bupati Sikka.

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 ini merupakan lanjutan dari rangkaian tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka dalam Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka tahun 2018-2023. Adapun sasaran, indikator dan capaian kinerja Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun 2023 dapat diuraikan dalam Tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1.
Capaian Indikator Kinerja Utama
Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULA INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	TARGET 2023	REALISASI 2023	PERSEN TASE %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya akuntabilitas perencanaan dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Nilai SAKIP		Nilai	84.22 (A)	84.22 (A)	88,50 (A)	105.08
		Persentase Dokumen Perencanaan, Pelaporan, Evaluasi dan Pengendalian Perangkat Daerah yang berkualitas (waktu, kesesuaian dengan tema dan target pembangunan)	$\frac{\text{Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang berkualitas}}{\text{Jml perangkat daerah}} \times 100$	persen	100	100	100	100
		Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD	$\frac{\text{Jml Prog. RKPD Tahun berkenaan}}{\text{Jml. Prog. RPJMD yang harus dilaksanakan}} \times 100$	persen	100	100	97.52	97.52

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
		Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPDP Kedalam APBD	Jml Prog. RKPDP Tahun berkenaan	Jml. Prog. RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan	x 100	persen	100	100	94.21	94.21
		Persentase Partisipasi Masyarakat dalam proses perencanaan	Jml masyarakat yg hadir dlm Musrenbang		x 100	persen	100	96	100	100
			Jumlah peserta Musrenbang							
2.	Meningkatnya kualitas dan efektifitas kegiatan Kelitbangan	Persentase Implementasi rencana kelitbangan	Jml hasil kajian Kelitbangan yg ditindaklanjuti		x 100	persen	100	100	100	100
			Jml hasil kajian Kelitbangan tahun berkenaan							

Sumber : Olahan Bapelitbang Kabupaten Sikka, 2023

Dari data tersebut diatas, Persentase Dokumen Perencanaan, Pelaporan, Evaluasi dan Pengendalian Perangkat Daerah yang berkualitas (waktu, kesesuaian dengan tema dan target pembangunan) sebesar 100% dari target Tahun 2023 yang juga merupakan target akhir periode Renstra sebesar 100%, Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPDP Tahun 2023 dengan capaian sebesar 97.52% dari target Tahun 2023 yang juga merupakan target akhir periode Renstra sebesar 100% dengan demikian masih belum mencapai target. Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPDP Kedalam APBD Tahun 2023 capaiannya sebesar 94.21% dari target Tahun 2023 yang juga merupakan target akhir periode Renstra sebesar 100% dengan demikian masih belum mencapai target. Persentase Partisipasi Masyarakat dalam proses perencanaan sebesar 100% target Tahun 2023 yang juga merupakan target akhir periode Renstra sebesar 96% sudah melampaui target. Persentase hasil kelitbangan Sebagai Masukan Penyusunan Kebijakan Tahun 2023 sebesar 100% yang juga merupakan target akhir periode Renstra sebesar 100%.

Gambaran perbandingan pencapaian target kinerja Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka 3 tahun terakhir dari Tahun 2021, 2022 dan 2023 dapat disajikan melalui tabel berikut :

Tabel 3.2.

Perbandingan pencapaian kinerja pada sasaran tahun 2021, 2022 dan 2023

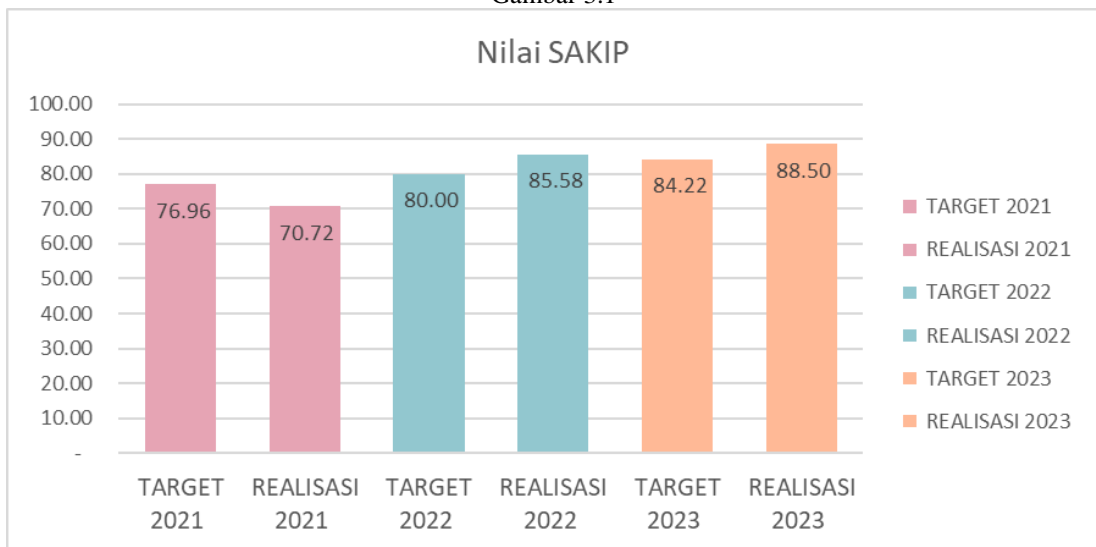
NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2021		CAPAIAN KINERJA THN 2021 (%)	TAHUN 2022		CAPAIAN KINERJA THN 2022 (%)	TAHUN 2023		CAPAIAN KINERJA THN 2023 (%)	KET
			TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Nilai SAKIP	Nilai	76.96 (BB)	70.72 (BB)	91.90	80 (A)	85.58 (A)	106.98	84.22 (A)	88.50 (A)	105.08	

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2021		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 (%)	TAHUN 2022		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 (%)	TAHUN 2023		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 (%)	KET
			TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI		
2	Persentase Dokumen Perencanaan, Pelaporan, Evaluasi dan Pengendalian Perangkat Daerah yang berkualitas (waktu, kesesuaian dengan tema dan target pembangunan)	Persen	-	-	-	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Konsistensi Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD	Persen	99.80	100	100	99.85	100	100.15	100	100	100	
4	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam APBD	Persen	100	93.98	93.98	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Peran serta Masyarakat proses perencanaan	Persen	92	30	32.61	94	58.13	61.84	96	
6	Persentase Hasil Kelitbangan Sebagai Masukan Penyusunan Kebijakan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Indikator pendukung SAKIP (Tidak menjadi Indikator Utama dipindahkan dan digabung ke Eselon III)												
1	Indeks Profesionalitas ASN Badan Perencanaan dan Litbang Kab. Sikka	Persen	78	91.85	117.76	82	92.85	112.85	-	-	-	Tidak dapat diukur karena salah satu elemen mengalami perubahan
2	Indeks Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan dan Litbang Kab. Sikka	Indeks	0.37	0.41	110.76	0.47	0.51	108.51	0.63	0.54	85.71	
3	Persentase Perangkat Daerah yang taat terhadap Siklus Perencanaan	Persen	100	100	100	-	-	-				Indikator yang digabung ke poin 5
4	Persentase Perangkat Daerah yang taat terhadap Siklus Pelaporan	Persen	85	89.60	105	-	-	-				Indikator yang digabung ke poin 5
5	Meningkatnya ketaatan Bapelitbang terhadap perencanaan, evaluasi dan pengendalian	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

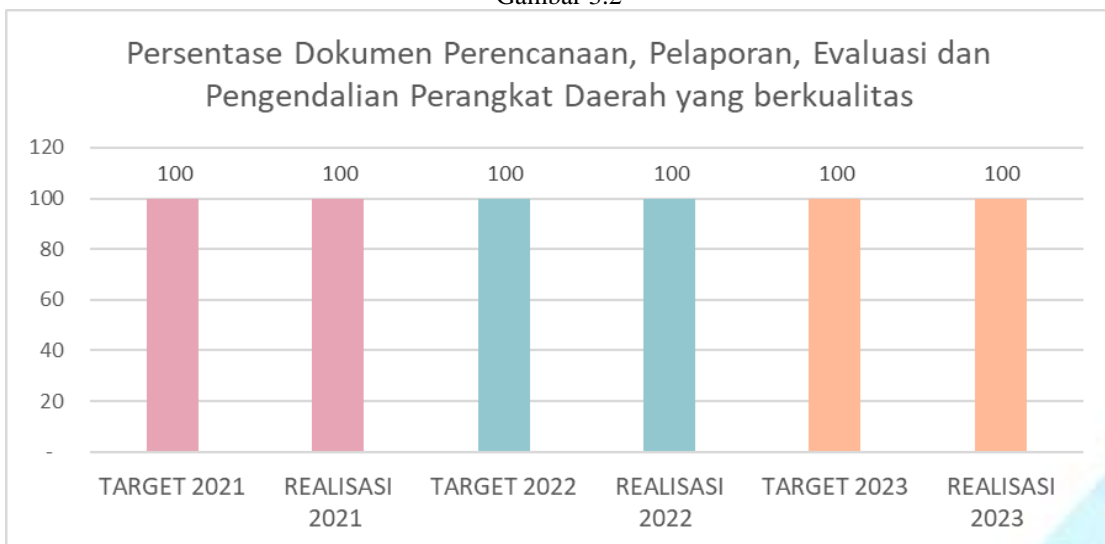
Sumber : Bapelitbang Kab.Sikka 2023

Gambaran capaian realisasi indikator kinerja Bapelitbang Tahun 2021 – 2023 jika disajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut :

Gambar 3.1



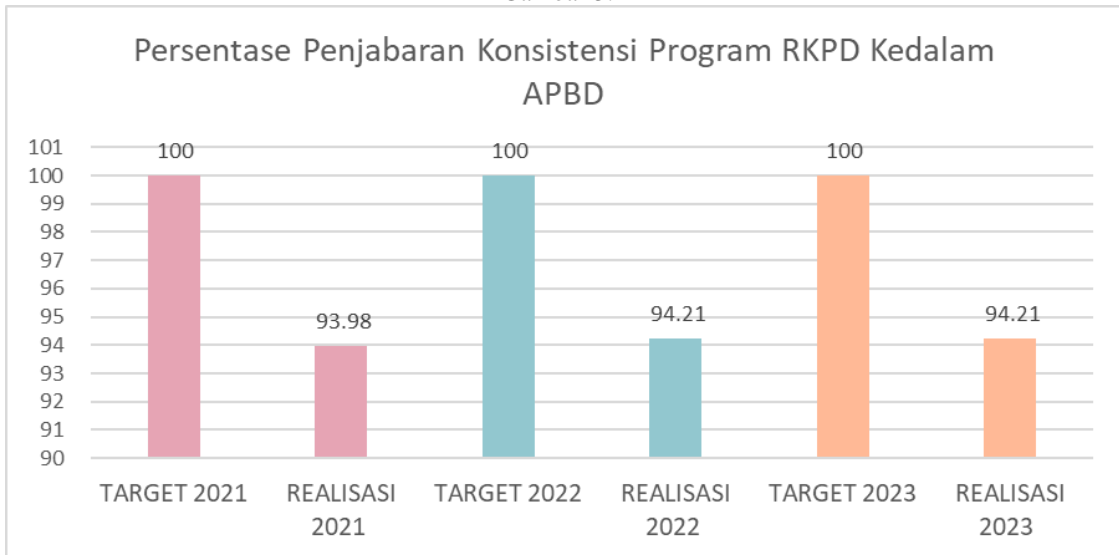
Gambar 3.2



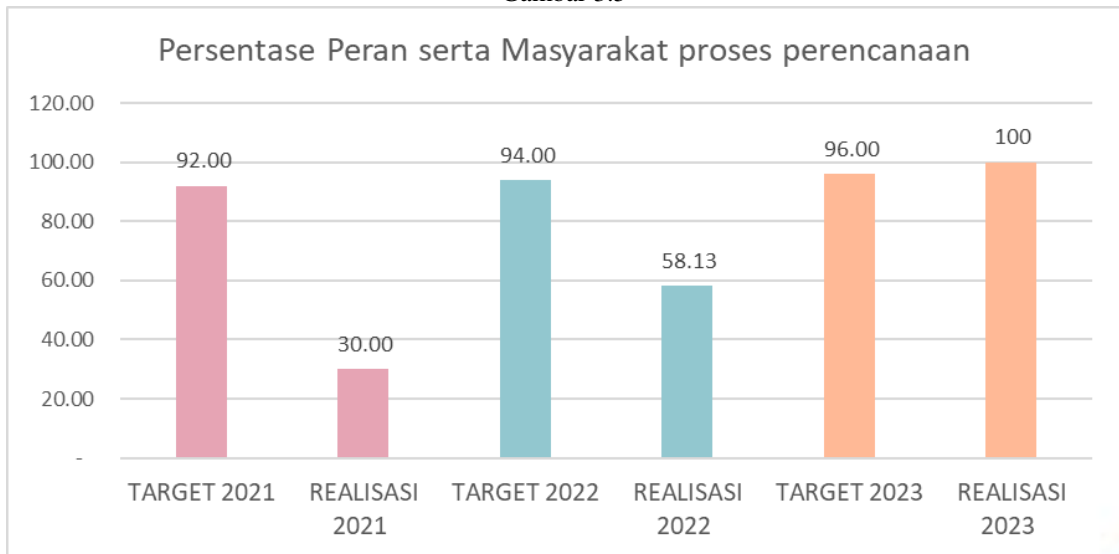
Gambar 3.3



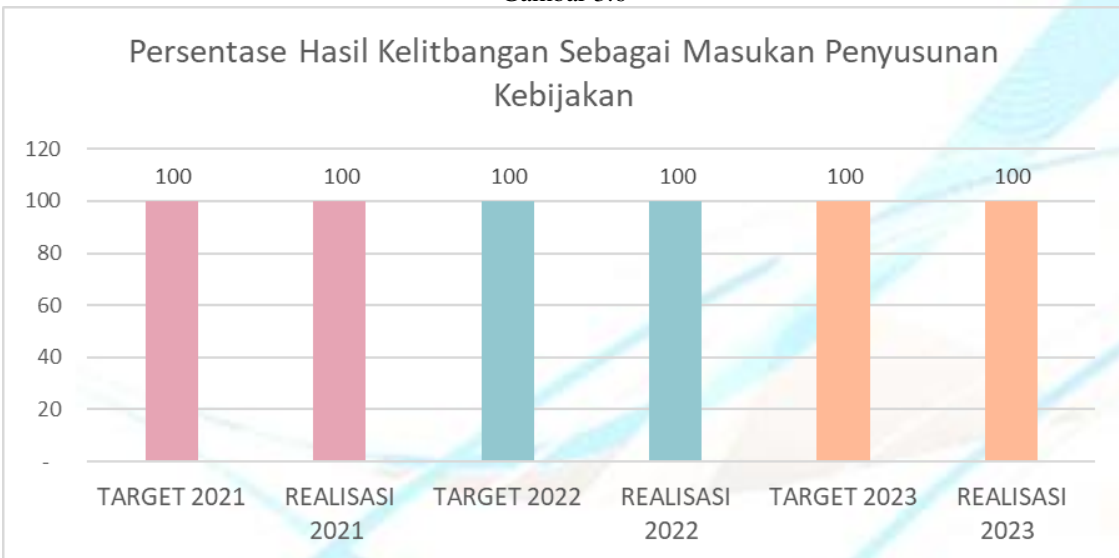
Gambar 3.4



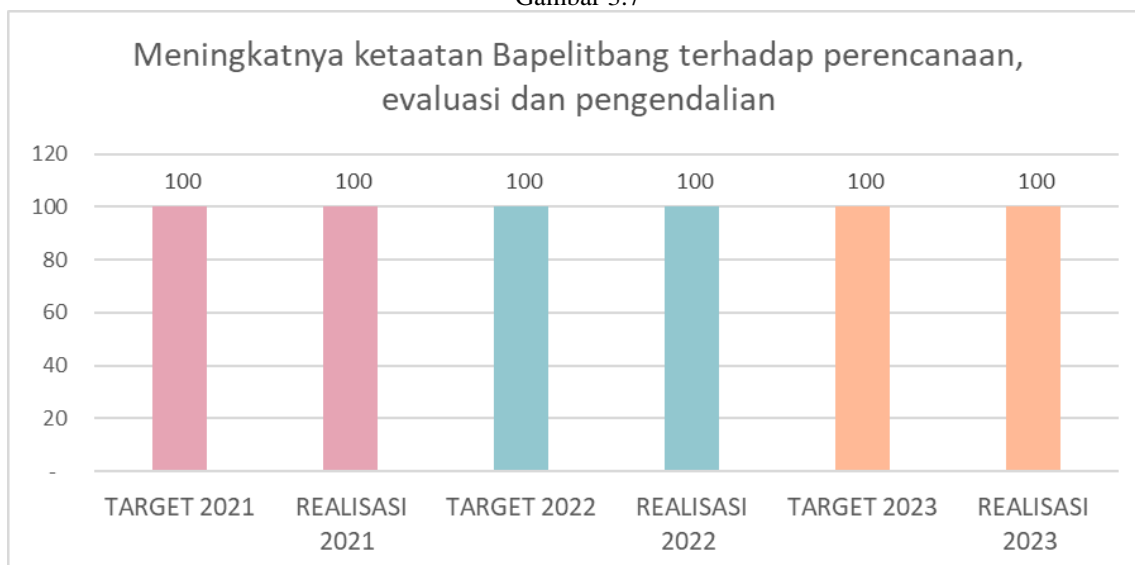
Gambar 3.5



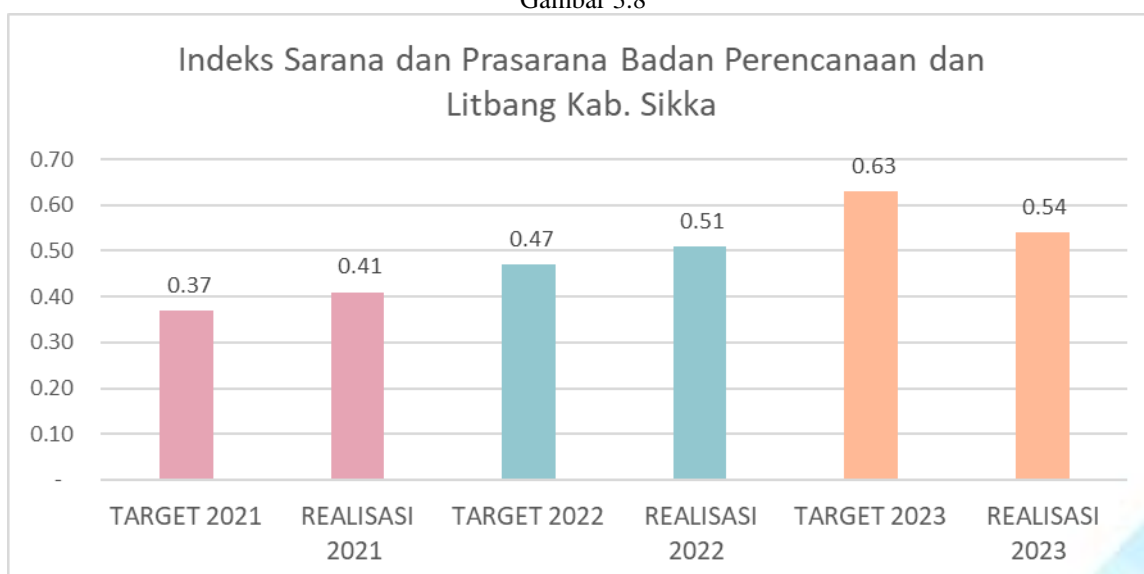
Gambar 3.6



Gambar 3.7



Gambar 3.8



Selanjutnya hasil pengukuran dijabarkan sesuai dengan analisa pelaksanaan program/kegiatan pendukung pencapaian realisasi masing-masing indikator. Uraian sasaran strategis beserta Indikator-Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun 2023 berdasarkan Perubahan Renstra Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 sebagai berikut :

3.1.1. Pengukuran Pencapaian Sasaran 1 Indikator (1), (2), (3), (4), dan (5)

Sasaran 1 : Meningkatnya perencanaan dan akuntabilitas kinerja birokrasi

Indikator (1) : Nilai SAKIP

Indikator (2) : Persentase Dokumen Perencanaan, Pelaporan, Evaluasi dan Pengendalian Perangkat Daerah yang berkualitas (waktu, kesesuaian dengan tema dan target pembangunan)

- Indikator (3) : Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD
- Indikator (4) : Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam APBD
- Indikator (5) : Persentase Partisipasi Masyarakat dalam proses perencanaan

Tabel 3.3.

Capaian Kinerja Sasaran 1 Indikator (1), (2), (3), (4) dan (5)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023
Meningkatnya koordinasi dan tata kelola perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien	Nilai SAKIP	84,22	88,50	105,08
	Persentase Dokumen Perencanaan, Pelaporan, Evaluasi dan Pengendalian Perangkat Daerah yang berkualitas (waktu, kesesuaian dengan tema dan target pembangunan)	100	100	100
	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD	100	97,52	97,52
	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam APBD	100	94,21	94,21
	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Proses Perencanaan	96	100	100

Sumber : Olahan Bapelitbang Kabupaten Sikka, 2023

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Capaian Indikator Kinerja dari Nilai SAKIP Bapelitbang Kab. Sikka pada Tahun 2023 adalah sebesar 105.08%, Persentase Dokumen Perencanaan, Pelaporan, Evaluasi dan Pengendalian Perangkat Daerah yang berkualitas (waktu, kesesuaian dengan tema dan target pembangunan) pada Tahun 2023 adalah sebesar 100%, Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD pada Tahun 2023 adalah sebesar 97.52%, capaian Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam APBD pada tahun 2023 sebesar 94,21%, Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Proses Perencanaan pada Tahun 2023 adalah sebesar 100%, indikator persentase partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan di Tahun 2023 menunjukkan adanya peningkatan peranserta masyarakat dalam proses perencanaan dibandingkan dengan tahun 2022, namun masih juga terdapat beberapa indikator yang belum memenuhi target yang telah ditetapkan hingga Tahun 2023; sehingga menjadi perhatian untuk diperbaiki dan ditingkatkan lagi di tahun-tahun selanjutnya melalui upaya koordinasi yang intens ditingkat pemerintah dan kelompok/Lembaga masyarakat serta lebih konsisten pada berbagai peraturan perundang-undangan yang mendasari proses perencanaan.

Pencapaian sasaran ini ditempuh melalui pengalokasian anggaran dan realisasi pelaksanaan Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.4.
Capaian Anggaran Sasaran 1 Indikator (1), (2), (3), (4), (5) dan (6)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Anggaran 2023	Realisasi Anggaran 2023	Capaian 2023
Meningkatnya akuntabilitas perencanaan dan akuntabilitas kinerja birokrasi	1. Nilai SAKIP				
	2. Persentase Dokumen Perencanaan, Pelaporan, Evaluasi dan Pengendalian Perangkat Daerah yang berkualitas (waktu, kesesuaian dengan tema dan target pembangunan)				
	3. Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPd				
	4. Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPd Kedalam APBD				
	5. Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Proses Perencanaan				
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp1.617.773.620,-	Rp.1.395.639.900,-	86.27
		Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Rp1.703.188.500,-	Rp.957.706.960,-	89.24
		Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp115.677.320,-	Rp.115.070.000,-	99,57
		Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp428.907.800,-	Rp.322.862.940,-	75.28
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp977.703.700,-	Rp.869.444.926,-	88.93
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Rp.388.579.900,-	Rp.342.397.996,-	88.12	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Rp.296.812.900,-	Rp.269.450.230,-	90.78	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Rp.292.310.900,-	Rp.257.596.700,-	88.12	
			Rp2.595.477.320,-	Rp.2.265.084.826,-	87.60

Sumber : Olahan Bapelitbang Kabupaten Sikka, 2023

Dari tabel diatas didapatkan bahwa capaian anggaran yang mendukung pencapaian sasaran ini yaitu sebesar 87.60% dengan persentase anggaran yang mendukung sasaran ini sebesar 42.32% dari total anggaran Belanja Daerah Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2023 setelah dikurangi gaji dan tunjangan lainnya. Pencapaian indikator kinerja program dan kinerja anggaran diperoleh melalui pelaksanaan program dan kegiatan, sebagai berikut :

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Capaian program tersebut antara lain melalui pelaksanaan kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan yang didukung oleh 4 sub kegiatan

yaitu Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD, Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota, Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan, dan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota, untuk kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang didukung oleh 2 sub kegiatan yaitu Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota. Sementara untuk kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah didukung oleh 2 sub kegiatan yaitu Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota dan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah

2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Dukungan Capaian program tersebut antara lain melalui pelaksanaan kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, yang didukung oleh 6 sub kegiatan yaitu : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD), Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan, Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan, Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD), Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia dan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia.

kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam), yang didukung oleh 6 sub kegiatan yaitu : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD), Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian, Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian, Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD), Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA dan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA.

kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang didukung oleh 7 sub kegiatan yaitu : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD), Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur, Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur,

Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD), Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan, Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan dan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran meningkatnya akuntabilitas perencanaan dan akuntabilitas kinerja birokrasi antara lain disebabkan karena :

1. Lemahnya kondisi fiscal daerah sebagai akibat masih belum optimalnya pencapaian target penerimaan daerah;
2. Adanya persepsi masyarakat atas penyelenggaraan Musrenbang sebagai kegiatan rutinitas;
3. Usulan masyarakat yang belum direalisasi;
4. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap jaminan realisasi rencana;
5. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyusunan perencanaan dan penganggaran serta evaluasi dan pengendalian;

Sehubungan dengan hambatan seperti tersebut diatas maka upaya-upaya yang dilakukan untuk perbaikan peningkatan capaian kinerja yakni :

1. Perlu sosialisasi dan diseminasi secara berkala dan berjenjang berbagai jenis perencanaan;
2. Koordinasi dini terkait program/kegiatan strategis dan tema pembangunan tahun rencana sehingga bisa disinergikan dengan usulan masyarakat;
3. Menggali peluang potensi penerimaan daerah dan ketaatan masyarakat terkait pembayaran pajak dan retribusi;
4. Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan secara rutin;
5. Menentukan prioritas pembangunan berdasarkan isu strategis yang telah ditetapkan;
6. Peningkatan dan pengembangan sistem perencanaan, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan.

3.1.2. Pengukuran Pencapaian Sasaran 2 Indikator (6)

Sasaran 3 : Meningkatkan kualitas hasil kajian kelitbangan

Indikator (3) : Persentase Hasil Kelitbangan Sebagai Masukan Penyusunan Kebijakan

Tabel 3.5.

Capaian Kinerja Sasaran 2 Indikator (6)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023
Meningkatnya kualitas hasil kajian kelitbangan	Persentase Hasil Kelitbangan Dalam Penyusunan Kebijakan Daerah	100	100	100%

Sumber : Olahan Bapelitbang Kabupaten Sikka, 2023

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Persentase Hasil Kelitbangan Dalam

Penyusunan Kebijakan Daerah pada Tahun 2023 mencapai 100%.

Sedangkan alokasi dan realisasi anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran ini melalui Program Penelitian dan Pengembangan Daerah yang dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.6.
Capaian Anggaran Sasaran 2 Indikator (6)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Anggaran 2023	Realisasi Anggaran 2023	Capaian 2023
Meningkatnya kualitas hasil kajian kelitbang	Persentase Hasil Kelitbang Sebagai Masukan Penyusunan Kebijakan	Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp.2.102.189.576,-	Rp.2.061.378.310,-	98.06

Sumber : Olahan Bapelitbang Kabupaten Sikka, 2023

Dari tabel diatas didapatkan bahwa capaian anggaran yang mendukung pencapaian sasaran ini yaitu sebesar 98.06% dengan persentase anggaran yang mendukung sasaran ini sebesar 33.61% dari total anggaran Belanja Daerah Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2023 setelah dikurangi gaji dan tunjangan lainnya. Pencapaian indikator kinerja program dan kinerja anggaran diperoleh melalui pelaksanaan Program Penelitian dan Pengembangan Daerah, dengan kegiatannya adalah :

- Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
Kegiatan ini di dukung dengan 3 Sub Kegiatan yaitu Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi, sub kegiatan ini dilaksanakan untuk Penyusunan dan Penginputan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kelitbang dan Peraturan, sub kegiatan ini dilaksanakan untuk Penelitian dan Penyusunan Kajian Potensi Ekonomi Desa Menuju Desa Mandiri dan Penelitian dan Penyusunan Rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif Kabupaten Sikka serta Pengelolaan Data Kelitbang serta Update Data Hasil Kelitbang, Sub Kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan, sub kegiatan ini dilaksanakan untuk koordinasi pelaksanaan Satu Data Kabupaten Sikka.
- Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
Kegiatan ini didukung dengan sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pariwisata. Sub kegiatan ini dilaksanakan untuk Penelitian dan Penyusunan Kajian Keragaman Geologi dan Warisan Geologi untuk Pengembangan Geopark.
- Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Pembangunan
Kegiatan ini didukung dengan sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum. Sub kegiatan ini dilaksanakan untuk Penyusunan dan Review Dokumen Rencana Induk Insfratraktur.

- Pengembangan Inovasi dan Teknologi
Kegiatan ini didukung dengan sub kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi berupa pelaksanaan operasional produksi Cokelat Sikka (chosik) juga Pelatihan Uji Citarasa Kakao di Puslitbang Kopi dan Kakao Jember, sub kegiatan Uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dana penerapan teknologi dilaksanakan mendorong perangkat daerah/lembaga/masyarakat dalam rangka menciptakan dan mengembangkan inovasi baru melalui lomba inovasi daerah, sub kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat Inovatif, sub kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka koordinasi dan mengikuti Inovation Goverment Awards (IGA). Sub kegiatan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dilaksanakan dalam rangka menggali berbagai data dan informasi terkait kekayaan intelektual yang ada dimasyarakat untuk didorong sehingga mendapat perlindungan hukum bagi kekayaan atau kekhasan daerah.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran meningkatnya kualitas hasil kajian kelitbang antara lain disebabkan karena :

1. Masih rendahnya kesediaan berbagi data oleh perangkat daerah dan Lembaga selaku produsen data untuk kebutuhan perencanaan
2. Masih rendahnya kualitas data yang dihasilkan setiap sektor
3. Masih rendahnya pengetahuan dan penciptaan inovasi daerah
4. Pelaksanaan produksi chosik masih belum maksimal akibat mesin produksi pengolah cokelat mengalami kerusakan.

Sehubungan dengan hambatan seperti tersebut diatas maka upaya-upaya yang dilakukan untuk perbaikan peningkatan capaian kinerja yakni :

1. Meningkatkan kerjasama dan komitmen bersama dalam wadah Forum Satu Data
2. Mendorong perangkat daerah dan berbagai Lembaga untuk menghasilkan inovasi daerah dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah/kepala perangkat daerah/Lembaga terkait.
3. Pemeliharaan mesin produksi.

Indikator Pendukung Capaian Kinerja Bapelitbang Kabupaten Sikka

3.1.3. Pengukuran Pencapaian Sasaran 1 (Indikator Penunjang)

Sasaran : Meningkatnya ketaatan Bapelitbang terhadap pelaporan, evaluasi dan pengendalian

Indikator : Persentase ketaatan Bapelitbang terhadap perencanaan, evaluasi dan pengendalian

Tabel 3.7.
Capaian Kinerja Sasaran 1 (Indikator Penunjang)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023
Meningkatnya ketaatan Bapelitbang terhadap pelaporan, evaluasi dan pengendalian	Persentase ketaatan Bapelitbang terhadap perencanaan, evaluasi dan pengendalian	100	100	100

Sumber : Olahan Bapelitbang Kabupaten Sikka, 2023

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Capaian Indikator Persentase ketaatan Bapelitbang terhadap perencanaan, evaluasi dan pengendalian pada Tahun 2023 sebesar 100%.

Alokasi dan realisasi anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran ini melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yang dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.8.
Capaian Anggaran Sasaran 1 (Indikator Penunjang)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Anggaran 2023	Realisasi Anggaran 2023	Capaian 2023
Meningkatnya ketaatan Bapelitbang terhadap pelaporan, evaluasi dan pengendalian	Persentase ketaatan Bapelitbang terhadap perencanaan, evaluasi dan pengendalian	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Rp14.998.800,-	Rp13.742.500,-	91.62
			Rp14.998.800,-	Rp13.742.500,-	91.62

Sumber : Olahan Bapelitbang Kabupaten Sikka, 2023

Dari tabel diatas didapatkan bahwa capaian anggaran yang mendukung pencapaian sasaran ini yaitu sebesar 91.62% dengan persentase anggaran yang mendukung sasaran ini sebesar 0.22% dari total anggaran Belanja Daerah Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2023 setelah dikurangi gaji dan tunjangan lainnya.

Pencapaian indikator kinerja program dan kinerja anggaran diperoleh melalui pelaksanaan program dan kegiatan, sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Pada tahun 2023 kinerja yang dicapai dalam program ini sebesar 91.62%.

Capaian program tersebut dicapai antara lain melalui pelaksanaan kegiatan :

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Kegiatan ini dicapai melalui pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

3.1.4. Pengukuran Pencapaian Sasaran 2 (Indikator Penunjang)

Sasaran : Meningkatnya Profesionalitas ASN

Indikator : Indeks Profesionalitas ASN Badan Perencanaan dan Litbang Kab. Sikka

Pengukuran Capaian Kinerja untuk Indikator Indeks Profesionalitas ASN Badan Perencanaan dan Litbang Kab. Sikka tidak dapat dilakukan sebagai akibat dari terjadinya perubahan pada salah satu elemen pembentuk yang dipakai untuk mengukur indikator ini yaitu pada elemen nilai SKP yang saat ini sudah tidak menggunakan nilai dalam bentuk angka namun dalam bentuk deskriptif.

Alokasi dan realisasi anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran ini melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yang dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.9.
Capaian Anggaran Sasaran 2 (Indikator Penunjang)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Anggaran 2023	Realisasi Anggaran 2023	Capaian 2023
Meningkatnya Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN Badan Perencanaan dan Litbang Kab. Sikka	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp3.332.409.146,-	Rp3.092.960.710,-	92.81
			Rp3.332.409.146,-	Rp3.092.960.710,-	92.81

Sumber : Olahan Bapelitbang Kabupaten Sikka, 2023

Dari tabel diatas didapatkan bahwa capaian anggaran yang mendukung pencapaian sasaran ini yaitu sebesar 92.81% dengan persentase anggaran yang mendukung sasaran ini sebesar 50.43% dari total anggaran Belanja Daerah Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2023.

Pencapaian indikator kinerja program dan kinerja anggaran diperoleh melalui pelaksanaan program dan kegiatan, sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Pada tahun 2023 kinerja yang dicapai dalam program ini sebesar 92.81%. Capaian program tersebut dicapai antara lain melalui pelaksanaan kegiatan :
 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Kegiatan ini dicapai melalui Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, serta Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD.
 - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Daerah, Kegiatan ini dicapai melalui Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.
 - Kegiatan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Kegiatan ini dicapai melalui penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, serta Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran ini adalah :

1. Pelaksanaan SOP terkait administrasi registrasi persuratan masih belum optimal.
2. Administrasi pertanggungjawaban keuangan masih kurang informatif.

Sehubungan dengan hambatan seperti tersebut diatas maka upaya-upaya yang dilakukan untuk perbaikan peningkatan capaian kinerja yakni :

1. Optimalisasi Penerapan SOP;
2. Penataan administrasi pertanggungjawaban keuangan.

3.1.5. Pengukuran Pencapaian Sasaran 3 (Indikator Penunjang)

Sasaran : Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik

Indikator : Indeks Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan dan Litbang Kab. Sikka

Tabel 3.10.
Capaian Kinerja Sasaran 3 (Indikator Penunjang)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik	Indeks Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan dan Litbang Kab. Sikka	0.63	0.54	85.71

Sumber : Olahan Bapelitbang Kabupaten Sikka, 2023

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Capaian Indikator Indeks Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan dan Litbang Kab. Sikka pada Tahun 2023 sebesar 85.71.

Alokasi dan realisasi anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran ini melalui Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, yang dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.11.
Capaian Anggaran Sasaran 3 (Indikator Penunjang)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Anggaran 2023	Realisasi Anggaran 2023	Capaian 2023
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik	Indeks Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan dan Litbang Kab. Sikka	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp986.402.353,-	Rp972.542.643,-	98.59
			Rp986.402.353,-	Rp972.542.643,-	98.59

Sumber : Olahan Bapelitbang Kabupaten Sikka, 2023

Dari tabel di atas didapatkan bahwa capaian anggaran yang mendukung pencapaian sasaran ini yaitu sebesar 98.59% dengan persentase anggaran yang mendukung sasaran ini sebesar 15.86% dari total anggaran Belanja Daerah Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2023 setelah dikurangi gaji dan tunjangan lainnya.

Pencapaian indikator kinerja program dan kinerja anggaran diperoleh melalui

pelaksanaan program dan kegiatan, sebagai berikut :

2. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten

Pada tahun 2023 kinerja yang dicapai dalam program ini sebesar 98.59%.

Capaian program tersebut dicapai antara lain melalui pelaksanaan kegiatan :

- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Kegiatan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Kegiatan ini dicapai melalui Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Kegiatan ini dicapai melalui Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya serta Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik antara lain disebabkan karena Instalasi Listrik Kantor yang masih belum optimal.

Sehubungan dengan hambatan seperti tersebut di atas maka upaya-upaya yang dilakukan untuk perbaikan peningkatan capaian kinerja yakni Penataan dan pemeliharaan Jaringan instalasi Listrik Kantor.

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai

- Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Manusia :

Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan yang efektif dan efisien adalah ketersediaan sumber daya manusia dengan jumlah yang cukup dan memiliki kualitas yang baik serta profesional sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kaitan antara manajemen sumberdaya manusia dengan peningkatan kinerja sangat berhubungan erat sehingga menjadi penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka dengan beberapa upaya yang dapat dilakukan :

Pertama, Kegiatan pelatihan-pelatihan dan diklat dalam rangka meningkatkan kualitas sumberdaya manusia terus didorong baik melalui kegiatan daring maupun offline demi peningkatan kinerja pelayanan Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka.

Kedua, Melakukan pengawasan melekat internal terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pegawai pada unit kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan yang berlaku.

Ketiga, Memberikan reward dan punishment kepada pegawai sesuai kinerja berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

- Efisiensi Penggunaan Sarana dan Prasarana :
 Dalam melaksanakan program dan kegiatannya, aparatur Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka ditunjang dengan sejumlah sarana dan prasarana kerja. Kondisi yang ada sarana prasarana kantor penunjang pelaksanaan kegiatan kantor seperti laptop dan printer dari sisi jumlah dan ketersediaan pegawai belum memadai.

Analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja

- Untuk tahun 2023, Badan Perencanaan dan Litbang Kab. Sikka melaksanakan 4 program, 15 kegiatan dan 52 sub kegiatan secara keseluruhan telah dilaksanakan dengan baik.
- Untuk tahun-tahun yang akan datang perlu diberi perhatian khusus terkait perencanaan waktu pelaksanaan kegiatan, dan tertib dalam pelaporan dan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan sehingga pencapaian kinerja dapat meningkat dan presentase realisasi anggaran juga dapat terserap dengan baik. Dari 4 program dan 15 kegiatan dan 52 sub kegiatan pada Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka semuanya sangat menunjang keberhasilan kinerja Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka.

Gambaran Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Eselon II-III dapat dilihat pada tabel-tabel berikut :

Tabel 3.12
Efisiensi Sumber Daya – Eselon II

NO	PERJANJIAN KINERJA		% TARGET CAPAIAN KINERJA (100%)	TARGET BIAYA	PENYERAPAN ANGGARAN	%TINGKAT EFISIENSI SD
	SASARAN	INDIKATOR KINERJA				
			96.04%	2,595,477,320	2,265,084,826	8.77%
1	Meningkatnya akuntabilitas perencanaan dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Nilai SAKIP	84.22%			
		Persentase Dokumen Perencanaan, Pelaporan, Evaluasi dan Pengendalian Perangkat Daerah yang berkualitas (waktu, kesesuaian dengan tema dan target pembangunan)	100%			
		Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPDP	100%			
		Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPDP Kedalam APBD	100%			
		Persentase Partisipasi Masyarakat dalam proses perencanaan	96%			
2	Meningkatnya kualitas hasil kajian kelitbangan	Persentase Hasil Kelitbangan dalam Penyusunan Kebijakan daerah	100%	2,102,189,576	2,061,378,310	1.94%
Efisiensi SD keseluruhan			98.02%	4,697,666,896	4,326,463,136	5.92%

Tabel 3.13
Efisiensi Sumber Daya – Eselon III (Sekretaris)

NO	PERJANJIAN KINERJA		% TARGET CAPAIAN KINERJA (100%)	TARGET BIAYA	PENYERAPAN ANGGARAN	%TINGKAT EFISIENSI SD
	SASARAN	INDIKATOR KINERJA				
1	Meningkatnya ketaatan Bapelitbang terhadap perencanaan, evaluasi dan pengendalian	Persentase ketaatan Bapelitbang terhadap perencanaan, evaluasi dan pengendalian	100%	14,998,800	13,742,500	8.38%
2	Meningkatnya Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN Badan Perencanaan dan Litbang Kab. Sikka	82%	3,332,409,146	3,092,960,710	-10.81%
3	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik	Indeks Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan dan Litbang Kab. Sikka	0.47%	986,402,353	972,542,643	-98.12%
Efisiensi SD keseluruhan			60.82%	4,333,810,299	4,079,245,853	-33.30%

Tabel 3.14
Efisiensi Sumber Daya – Eselon III (Bidang PPEPD)

NO	PERJANJIAN KINERJA		% TARGET CAPAIAN KINERJA	TARGET BIAYA	PENYERAPAN ANGGARAN	%TINGKAT EFISIENSI
	SASARAN	INDIKATOR KINERJA				
1	Meningkatnya capaian pelaksanaan Penyusunan Perencanaan & Pendanaan	Persentase capaian pelaksanaan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	100%	1,073,188,500	957,706,960	10.76%
		Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah	100%	21,947,400	21,930,100	0.08%
		Jumlah Usulan yang terakomodir	100%	167,450,800	167,410,710	0.02%
		Jumlah Berita Acara Musrenbang RKPD Kabupaten	100%	65,296,900	65,281,800	0.02%
		Dokumen Perencanaan yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah	100%	818,493,400	703,084,350	14.10%
2	Meningkatnya Jumlah Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	115,677,320	115,070,000	0.53%
		Jumlah Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (yang tersedia dan di amankan)	100%	54,664,020	54,568,200	0.18%
		Jumlah Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	61,013,300	60,501,800	0.84%
3	Meningkatnya kualitas Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	428,907,800	322,862,940	24.72%
		Jumlah Dokumen Perencanaan pengendalian yang dihasilkan	100%	179,428,400	164,786,240	8.16%
		Jumlah Dokumen Evaluasi yang dihasilkan	100%	249,479,400	158,076,700	36.64%
Efisiensi SD keseluruhan			100%	1,617,773,620	1,395,639,900	13.73%

Tabel 3.15
Efisiensi Sumber Daya – Eselon III (Bidang PPM)

NO	PERJANJIAN KINERJA		% TARGET	TARGET BIAYA	PENYERAPAN	%TINGKAT
	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN	EFISIENSI SD
	Meningkatnya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	388,579,900	342,397,996	11.88%
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang dihasilkan	100%	121,221,800	97,306,926	19.73%
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang di asistensi	100%	22,554,900	18,451,700	18.19%
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang di Monitoring dan Evaluasi	100%	15,747,400	12,664,900	19.57%
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang dihasilkan	100%	151,321,200	148,835,810	1.64%
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang di asistensi	100%	38,867,300	35,053,900	9.81%
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang di Monitoring dan Evaluasi	100%	38,867,300	30,084,760	22.60%
Efisiensi SD keseluruhan			100%	388,579,900	342,397,996	11.88%

Tabel 3.16
Efisiensi Sumber Daya – Eselon III (Bidang PSDA)

NO	PERJANJIAN KINERJA		% TARGET	TARGET BIAYA	PENYERAPAN	%TINGKAT
	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN	EFISIENSI SD
	Meningkatnya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100%	296,812,900	269,450,230	9.22%
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang dihasilkan	100%	75,453,500	74,189,170	1.68%

NO	PERJANJIAN KINERJA		% TARGET CAPAIAN KINERJA	TARGET BIAYA	PENYERAPAN ANGGARAN	%TINGKAT EFISIENSI SD
	SASARAN	INDIKATOR KINERJA				
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang di asistensi	100%	45,445,800	35,073,660	22.82%
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang di Monitoring dan Evaluasi	100%	92,872,800	86,585,700	6.77%
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang dihasilkan	100%	18,768,600	15,958,000	14.98%
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang di asistensi	100%	13,642,000	10,067,200	26.20%
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang di Monitoring dan Evaluasi	100%	50,630,200	47,576,500	6.03%
Efisiensi SD keseluruhan			100%	296,812,900	269,450,230	9.22%

Tabel 3.17
Efisiensi Sumber Daya – Eselon III (Bidang Infrastruktur dan kewilayahan)

NO	PERJANJIAN KINERJA		% TARGET CAPAIAN KINERJA	TARGET BIAYA	PENYERAPAN ANGGARAN	%TINGKAT EFISIENSI SD
	SASARAN	INDIKATOR KINERJA				
	Meningkatnya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	292,310,900	257,596,700	11.88%
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	100%	99,232,200	88,907,300	10.40%
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	100%	20,518,600	19,612,360	4.42%
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	100%	44,480,600	40,101,800	9.84%

NO	PERJANJIAN KINERJA		% TARGET CAPAIAN KINERJA	TARGET BIAYA	PENYERAPAN ANGGARAN	%TINGKAT EFISIENSI SD
	SASARAN	INDIKATOR KINERJA				
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	100%	45,243,800	38,848,640	14.13%
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	100%	20,206,600	14,591,200	27.79%
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	100%	25,812,000	21,156,300	18.04%
	Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	100%	36,817,100	34,379,100	6.62%
Efisiensi SD keseluruhan			100%	292,310,900	257,596,700	11.88%

3.2. Realisasi Anggaran Badan Perencanaan dan Litbang Kab. Sikka

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian depan, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diuraikan sebagai berikut :

2.2.1. Pendapatan

Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka mengelola Pendapatan Daerah dari hasil penjualan Cho-Sik yang dikelola oleh UPT Sikka Inovation Centre. Tahun 2023 target pendapatan sebesar Rp250.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.192.608.900,- atau sebesar 77.04%.

2.2.2. Belanja Pegawai

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Tahun 2023 Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka menganggarkan Belanja Pegawai sebesar **Rp2.939.389.396,-** dengan realisasi sebesar **Rp2.704.395.810,-** atau 92.01% yang secara rinci dapat dilihat Tabel 3.18 berikut ini :

Tabel 3.18
 Anggaran dan Realisasi Anggaran Belanja Pegawai
 Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2023

NO.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
	BELANJA PEGAWAI	2,939,389,396	2,704,395,810	92.01
1.	Gaji Pokok/Uang Representasi	1.981.976.145.00	1,878,856,500	94.80
2.	Tunjangan Keluarga	164.257.348.00	154,299,768	93.94
3.	Tunjangan Jabatan	157,530,000.00	142,690,000	90.58
4.	Tunjangan Fungsional PNS	129.762.000.00	118,335,000	91.19
5.	Tunjangan Fungsional Umum	33.783.500	27.765.000	82.19
6.	Tunjangan Beras	112.986.063.00	97,911,840	86.66
7.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5,173,565.00	2,105,030	40.69
8.	Pembulatan Gaji	35,875.00	27,361	76.27
9.	Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) PNS	300,584,900.00	233,430,311	77.65
10.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	12.500.000	9,375,000	75.00
11.	Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	27.600.000	27.600.000	100
12.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Penyusunan dan Review Dokumen Rencana Induk Infrastruktur	3.450.000	3.150.000	91.30
13.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Penelitian dan Penyusunan Kajian Keragaman Geologi dan Warisan Geologi untuk Pengembangan Geopark	2.850.000	2.550.000	89.47
14.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Penelitian dan Penyusunan Kajian Potensi Ekonomi Desa Menuju Desa Mandiri	6.900.000	6.300.000	91.30

Sumber : Olahan Bapelitbang Kabupaten Sikka, 2023

2.2.3. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang mana dana tersebut merupakan sebagai salah satu unsur yang sangat penting dalam mencapai sasaran pembangunan, Tahun Anggaran 2023 Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka menganggarkan Belanja Barang dan Jasa sebesar **Rp6,051,272,200,-** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp5,677,291,663,-** atau 93.82% yang secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.19 berikut :

Tabel 3.19
 Anggaran dan Realisasi Anggaran Belanja Barang dan Jasa
 Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2023

NO.	URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	BELANJA BARANG DAN JASA	6,051,272,200,-	5,677,291,663,-	93.82
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1,366,805,304,-	1,346,034,344,-	98.48
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14,998,900,-	13,742,500,-	91.62

1	2	3	4	5
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	21.899,700,-	21,816,400,-	99.62
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	148,881,000,-	148,785,660,-	99.94
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	235,439,050,-	229,962,840,-	97.67
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	757,608,663,-	744,839,888,-	98.31
6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	187,977,991,-	186,887,056,-	99.42
2	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1,617,773,620,-	1,395,639,900,-	86.27
1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1,073,188,500,-	957,706,960,-	89.24
2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	115,677,320,-	115,070,000,-	99.47
3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	428,907,800,-	322,862,940,-	75.28
3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	977,703,700,-	869,444,926,-	88.93
1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	388,579,900,-	342,397,996,-	88.12
2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	296,812,900,-	269,450,230,-	90.78
3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	292,310,900,-	257,596,700,-	88.12
4	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	2,088,989,576,-	2,066,172,493,-	98.91
1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	956,819,000,-	950,519,000,-	99.34
2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	147,150,000,-	144,600,000,-	98.27
3	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Pembangunan	496,550,000,-	493,400,000,-	99.36
4	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	488,470,576,-	477,653,493,-	97.79

Sumber : Olahan Bapelitbang Kabupaten Sikka, 2023

2.2.4. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan belanja yang dianggarkan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai sasaran pembangunan, Tahun Anggaran 2023 Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka menganggarkan Belanja Modal sebesar **Rp43,115,699,-** Tabel Belanja Modal dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.20
 Anggaran dan Realisasi Anggaran Belanja Modal Tahun 2023
 Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2023

NO.	URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,300,000,-	2,300,000,-	100
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2,300,000,-	2,300,000,-	100
2.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	40,815,699,-	40,815,699,-	100
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40,815,699,-	40,815,699,-	100

Sumber : Bapelitbang Kab. Sikka, 2023

BAB IV PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan hasil capaian kinerja yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya seluruh capaian kinerja Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka pada Tahun 2023 dapat tercapai secara baik.

Laporan Kinerja Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun 2023 berisikan informasi-informasi pengelolaan kegiatan-kegiatan serta program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2023 dalam rangka pencapaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan. Laporan ini merupakan instrumen dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran serta merupakan perwujudan konkrit tingkat pencapaian kinerja Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka.

Secara umum kesimpulan dari pencapaian indikator kinerja pada Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun 2023, adalah sebagai berikut :

a. Capaian Indikator Kinerja

Capaian Indikator Kinerja Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun 2023 dapat dilihat pada Nilai SAKIP realisasi capaiannya 88.50 (A), Persentase Dokumen Perencanaan, Pelaporan, Evaluasi dan Pengendalian Perangkat Daerah yang berkualitas (waktu, kesesuaian dengan tema dan target pembangunan) capaiannya 100%, Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD capaiannya 97.52%, Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam APBD 94.21%, Persentase Partisipasi Masyarakat dalam proses perencanaan capaiannya 100%, Persentase Hasil Kelitbangan Sebagai Masukan Penyusunan Kebijakan capaiannya 100%, sementara untuk indikator pendukung yakni Meningkatnya ketaatan Bapelitbang terhadap Perencanaan, evaluasi dan pengendalian capaiannya 100%, Indeks Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka capaiannya 0.54%. Pencapaian Indikator Kinerja Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka sudah cukup optimal, dan perlu dipertahankan, bahkan ditingkatkan sedangkan untuk indikator kinerja yang belum tercapai perlu menjadi perhatian lebih.

b. Realisasi Anggaran

Pada Tahun 2023 alokasi belanja yang dianggarkan untuk membiayai pencapaian sasaran adalah sebesar Rp9,031,477,195,- yang tersebar

dalam komponen Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal dengan realisasi anggaran sebesar Rp8,405,708,989,- atau sebesar 93.07%. Dari persandingan antara persentase realisasi anggaran dengan persentase pencapaian sasaran dapat disimpulkan bahwa secara umum penggunaan anggaran di Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun 2023 sangat baik.

Sebagai penutup Laporan Kinerja Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun 2023 ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang pencapaian tujuan dan sasaran, realisasi indikator kinerja, serta penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja sesuai dokumen perencanaan Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka sehingga dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan pada tahun-tahun selanjutnya

3.2. Saran dan Rekomendasi

Evaluasi atas capaian hasil penyelenggaraan pemerintahan khususnya Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka, merupakan komitmen moral terhadap perbaikan kinerja yang dicapai. Hal ini menjadi landasan proporsional dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Kabupaten Sikka ke depan. Untuk itu marilah bersama-sama satukan kekuatan, rajut kebersamaan dan ciptakan kerjasama yang profesional.

Selanjutnya, pada prinsipnya permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan di Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka dapat dicarikan solusinya dengan baik. Namun demikian, langkah-langkah korektif dan antisipatif tetap dilakukan terhadap kemungkinan-kemungkinan masalah/hambatan yang timbul sebagai wujud dalam meningkatkan kinerja yang lebih baik kedepannya. Dengan demikian, program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat tercapai secara efektif, efisien dan akuntabel.

Untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang dengan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Memperkuat fungsi koordinasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan daerah, melalui (1) peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya aparatur perencana; (2) peningkatan kualitas pendataan dan analisa pembangunan untuk mendukung kualitas perencanaan; dan (3) peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

2. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat.
3. Peningkatan koordinasi/kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di pusat maupun daerah akan dilakukan dengan lebih intens, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan melibatkan berbagai sektor.

Maumere, 18 Januari 2024
Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian dan
Pengembangan Kabupaten Sikka,

Margaretha Movaldes DM Bapa,ST, M.Eng.

Pembina Tingkat I
NIP.19761206 200012 2 003

LAMPIRAN-LAMPIRAN

**PERUBAHAN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
BADAN PERENCANAAN DAN LITBANG KABUPATEN SIKKA
TAHUN 2023**

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya akuntabilitas perencanaan dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Nilai SAKIP	Nilai	84,22
		Persentase Dokumen Perencanaan, Pelaporan, Evaluasi dan Pengendalian Perangkat Daerah yang berkualitas (waktu, kesesuaian dengan tema dan target pembangunan)	Persen	100
		Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD	persen	00
		Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam APBD	persen	100
		Persentase Partisipasi Masyarakat dalam proses perencanaan	persen	96
2.	Meningkatnya kualitas hasil kajian kelitbangan	Persentase Hasil Kelitbangan dalam Penyusunan Kebijakan daerah	persen	100

Maumere, 02 November 2023

Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian dan
Pengembangan Kabupaten Sikka,

Margaretha M. D. M. Bapa, ST, M.Eng.

Pembina Tingkat I
NIP. 19761206 200012 2 003

PERUBAHAN POHON KINERJA BAPELITBANG KABUPATEN SIKKA TAHUN 2023

ISU / MASALAH POKOK	Masih rendahnya akuntabilitas perencanaan dan akuntabilitas kinerja Birokrasi					Masih rendahnya kinerja aparatur dalam pelayanan publik			
MASALAH	Belum optimalnya koordinasi dan tata kelola perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien				Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap perencanaan partisipatif	Kurangnya kualitas dan efektifitas kegiatan Kelitbang	Kurang maksimalnya kinerja Perencanaan, Evaluasi dan Pengendalian internal	Masih rendahnya Profesionalitas ASN	Masih rendahnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik
AKAR MASALAH	Belum optimalnya dokumen perencanaan, pelaporan, evaluasi dan pengendalian yang dihasilkan	Masih rendahnya kesesuaian Penjabaran Program RPJMD Kedalam RKPD	Masih rendahnya kesesuaian Penjabaran Program RKPD Kedalam APBD	Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap prioritas pembangunan dalam perencanaan	Kurangnya hasil kelitbang sebagai dasar masukan perumusan kebijakan pembangunan daerah	Perencanaan, evaluasi dan pengendalian Bapelitbang belum efektif	Masih rendahnya kompetensi aparatur	Belum terpenuhinya standarisasi sarana dan prasarana pelayanan publik	
MISI	Mewujudkan Reformasi Birokrasi					Mewujudkan Reformasi Birokrasi			
TUJUAN	Mewujudkan kualitas perencanaan yang baik dan terintegrasi					Meningkatnya kinerja aparatur dalam pelayanan publik pada Bapelitbang Kab. Sikka			
INDIKATOR TUJUAN	Persentase Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang					Indeks kualitas pelayanan publik Badan Perencanaan dan Litbang			
SASARAN	Meningkatnya akuntabilitas perencanaan dan akuntabilitas kinerja birokrasi					Meningkatnya kualitas hasil kajian kelitbang	Meningkatnya ketaatan Bapelitbang terhadap perencanaan, evaluasi dan pengendalian	Meningkatnya profesionalitas ASN	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Pelayanan Publik
INDIKATOR KINERJA SASARAN	Nilai SAKIP	Persentase Dokumen Perencanaan, Pelaporan, Evaluasi dan Pengendalian Perangkat Daerah yang berkualitas (waktu, kesesuaian dengan tema dan target pembangunan)	Persentase Penjabaran konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD	Persentase Penjabaran konsistensi Program RKPD Kedalam APBD	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam proses perencanaan	Persentase Hasil Kelitbang dalam Penyusunan Kebijakan daerah	Persentase ketaatan Bapelitbang terhadap perencanaan, evaluasi dan pengendalian	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks Sarana dan Prasarana pelayanan publik
PROGRAM	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota			
PENANGGUNG JAWAB	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Bidang Perekonomian dan SDA	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Bidang Penelitian dan Pengembangan	Sekretariat		

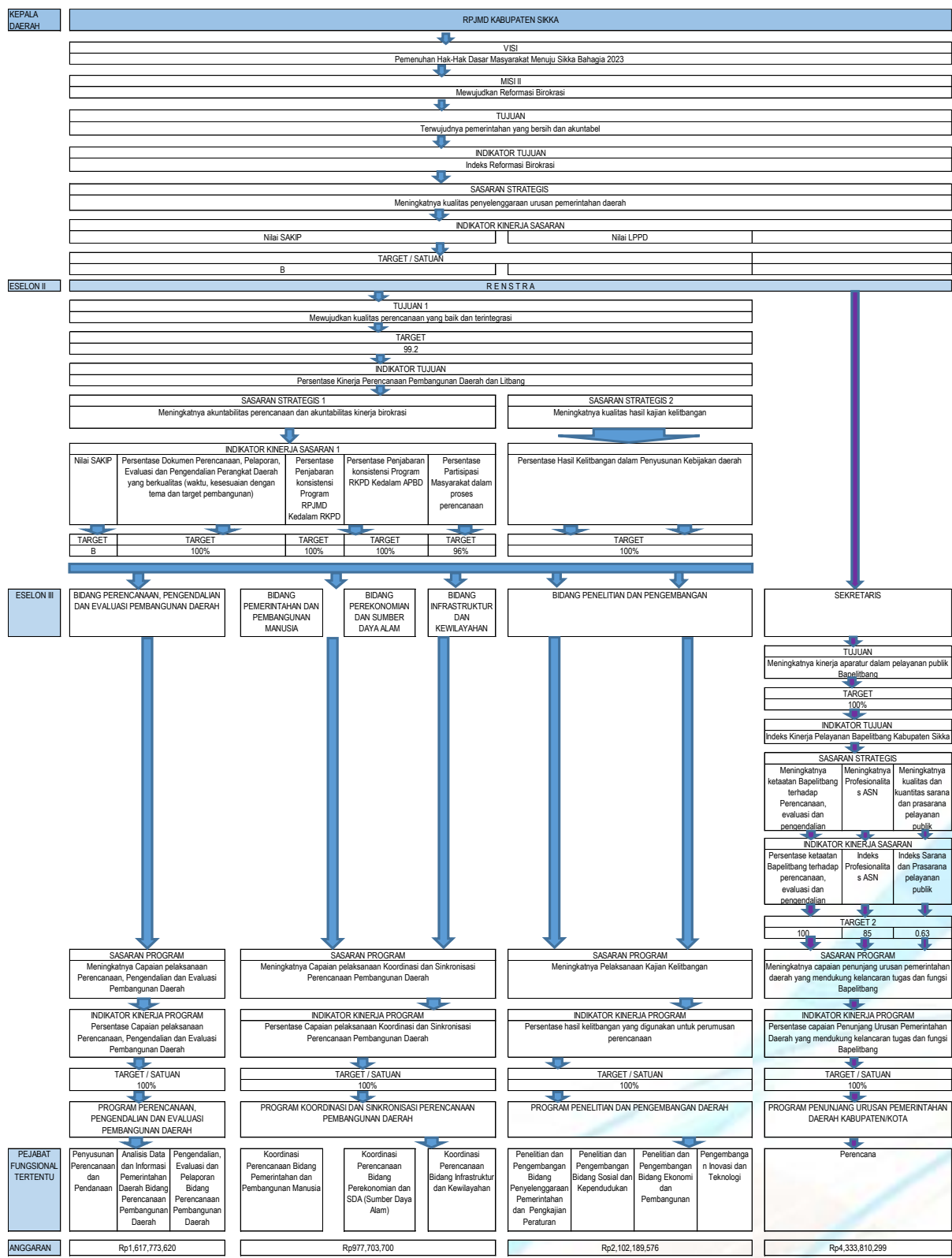
Mauwere, 02 November 2023

Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Sikka,

Margaretha Movaldes D.M Bapa, ST, M.Eng.

Pembina Tingkat I
NIP.19761206 200012 2 003

PERUBAHAN CASCADING BAPELITBANG KABUPATEN SIKKA TAHUN 2023



Mauwere, 02 November 2023

Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sikka,

Margaretha Movaldes D.M Bapa, ST, M.Eng.
Pembina Tingkat I
NIP.19761206 200012 2 003

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
BAPELITBANG KABUPATEN SIKKA TAHUN 2023**

Terlampir dalam dokumen terpisah.

**PERUBAHAN RENCANA AKSI
BADAN PERENCANAAN DAN LITBANG KABUPATEN SIKKA
TAHUN 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	TARGET				PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	HASIL YANG AKAN DICAPAI				ANGGARAN (Rp)				PENANGGUNGJAWAB
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	I	II	III	IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja birokrasi	1. Nilai SAKIP	84,22 (A)			88,50 (A)		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian pelaksanaan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	100%	17,86%	45,83%	23,22	13,09%	253,841,600	557,879,190	285,236,275	520,816,555	Hilarius Rangga Mesa, S.Si
		2. Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang berkualitas	100					Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase capaian pelaksanaan Penyusunan Perencanaan & Pendanaan	100%	-	98,18%	1,82%	-	210,392,600	453,918,090	187,258,775	221,619,035	Bertholomeus Baghi Tjeme, SE
		3. Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD	100					Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1 Berita Acara			1,812,000	20,128,200	-	7,200,000	Bertholomeus Baghi Tjeme, SE
		4. Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam APBD	100					Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/kota	1 Berita Acara		1 Berita Acara			14,855,000	150,333,610	-	2,262,190,000	Bertholomeus Baghi Tjeme, SE
		5. Persentase Partisipasi Masyarakat dalam proses perencanaan	96					Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah usulan yang terverifikasi oleh kecamatan	105 usulan		105 usulan			-	65,296,900	-	-	Bertholomeus Baghi Tjeme, SE
								Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten/kota yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah (RPJPD, RPJMD/RKPD)	3 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen		193,725,600	218,159,380	187,258,775	219,349,645	Bertholomeus Baghi Tjeme, SE
								Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	4 Dok	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Buku	1 Dokumen	-	74,929,800	34,082,800	6,664,720	Alfred Zedekias, SE
								Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	3 Dok	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	40,750,000.00	8,532,300	5,381,720	Alfred Zedekias, SE
								Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku			1 Buku		-	34,179,800	25,550,500	1,283,000	Alfred Zedekias, SE
								Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	5 Dok/Lap	2 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	43,449,000	29,031,300	63,894,700	292,532,800	Paskalia Carmelita Monasare, SP
								Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	-	-	2 Laporan	-	-	1,800,000	37,136,100	140,492,300	Paskalia Carmelita Monasare, SP
								Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	5 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	43,449,000	27,231,300	26,758,600	152,040,500	1. Paskalia Carmelita Monasare, SP 2. Alfred Zedekias, SE

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	TARGET				PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	HASIL YANG AKAN DICAPAI				ANGGARAN (Rp)				PENANGGUNGJAWAB
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	I	II	III	IV	
								PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	14,12%	33,9%	51,22%	0,75%	73,325,090	220,223,336	151,064,600	533,090,674	1. Drs. Hironimus Laja 2. Yeremias Dewa, S.Pt, MP 3. Theresia Maria Da Renya Sabeweo, ST, MT
								Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	10,16%	37,29%	50,28%	2,27%	24,500,290	72,449,146	59,342,400	232,288,064	Drs. Hironimus Laja
								Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	8 Dokumen	2 Laporan	3 Dokumen	3 Dokumen	-	21,555,290	23,818,836	8,068,700	67,778,974	Maria Mei Ika Yuplina, SSTP, M.Ec. Dev
								Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	8 Laporan	2 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	-	-	2,213,300	8,660,800	11,680,800	Maria Mei Ika Yuplina, SSTP, M.Ec. Dev
								Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	6 Laporan	3 Laporan	-	3 Laporan	-	860,000	1,552,800	3,843,400	9,491,200	Maria Mei Ika Yuplina, SSTP, M.Ec. Dev
								Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	62 Dokumen	-	30 Dokumen	32 Dokumen	-	1,200,000	33,064,210	4,154,200	112,902,790	Charolus Luanga Saka, S.IP
								Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	62 Laporan	-	30 Dokumen	32 Dokumen	-	885,000	9,550,000	18,911,300	9,521,000	Charolus Luanga Saka, S.IP
								Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	31 Laporan	15 Laporan	-	16 Laporan	-	-	2,250,000	15,704,000	20,913,300	Charolus Luanga Saka, S.IP
								Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	100%	16,67%	33,33%	50,00%	-	19,371,600	71,893,550	52,301,600	153,246,150	Yeremias Dewa, S.Pt, MP
								Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	14 Dokumen	-	7 Dokumen	7 Dokumen	-	15,083,000	24,363,090	25,214,600	10,792,810	1. Maria Felixia Octaviyani, ST 2. Ignatius Bin Los, SE
								Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	14 Laporan	-	7 Laporan	7 Laporan	-	488,600	16,382,660	16,075,000	12,499,540	1. Maria Felixia Octaviyani, ST 2. Ignatius Bin Los, SE
								Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	14 Laporan	7 Laporan	-	7 Laporan	-	-	17,440,500	5,849,200	69,583,100	1. Maria Felixia Octaviyani, ST 2. Ignatius Bin Los, SE

TARGET	TARGET				PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	HASIL YANG AKAN DICAPAI				ANGGARAN (Rp)				PENANGGUNGJAWAB
	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	I	II	III	IV	
					Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	3,075,000	2,162,800	13,530,800	Gonsaly Sisilia Djado Bala, S.Si
					Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	4 Laporan	-	2 Laporan	2 Laporan	-	3,800,000	2,400,000	3,000,000	4,442,000	Gonsaly Sisilia Djado Bala, S.Si
					Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	4 Laporan	2 Laporan	-	2 Laporan	-	-	8,232,300	-	42,397,900	Gonsaly Sisilia Djado Bala, S.Si
					Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	15,54%	31,08%	53,38%	-	29,453,200	75,880,640	39,420,600	147,556,460	3. Theresia Maria Da Renya Sabewo, ST, MT
					Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	20 Dokumen	-	10 Dokumen	10 Dokumen	-	14,325,000	10,485,500	11,123,100	63,298,600	1. Blasius Blagin, ST 2. Maria Ernestin Sodin, ST
					Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	20 Laporan	-	10 Dokumen	10 Dokumen	-	3,046,600	14,125,760	-	3,346,240	1. Blasius Blagin, ST 2. Maria Ernestin Sodin, ST
					Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	20 Laporan	10 Laporan	-	10 Laporan	-	5,431,600	3,200,000	9,575,000	26,274,000	1. Blasius Blagin, ST 2. Maria Ernestin Sodin, ST
					Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	136 Dokumen	-	68 Dokumen	68 Dokumen	-	3,650,000	22,976,280	2,248,500	16,369,020	Karolus Eduardus Suhana, S.Pt
					Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	136 Laporan	-	68 Laporan	68 Laporan	-	3,000,000	3,250,000	3,000,000	10,956,600	Karolus Eduardus Suhana, S.Pt
					Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	136 Laporan	68 Laporan	-	68 Laporan	-	-	-	2,150,000	23,662,000	Karolus Eduardus Suhana, S.Pt
					Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	34 Laporan	-	-	34 Laporan	-	-	21,843,100	11,324,000	3,650,000	Karolus Eduardus Suhana, S.Pt

TARGET	TARGET				PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	HASIL YANG AKAN DICAPAI				ANGGARAN (Rp)				PENANGGUNGJAWAB
	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	I	II	III	IV	
100				100	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kelitbangan yang digunakan untuk perumusan perencanaan	100%	-	-	25%	1	104,317,548	692,498,052	705,698,554	599,675,422	Fransiskus S. Nara Bata, S.T, M.Sc
					Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Kelitbangan yang direkomendasikan	100%	-	-	-	100%	76,381,943	226,491,330	423,567,977	237,277,750	
					Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	1 Laporan	-	-	-	1 Laporan	11,308,143	20,591,067	26,420,790	15,430,000	Maximus Sabu, SE
					Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Dokumen, Data dan Informasi Kelitbangan yang dikelola dengan baik	1 Laporan	-	-	-	1 Laporan	58,381,300	173,880,800	361,840,150	221,847,750	Fransiskus Xaverius Leu, SKM
					Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	1 Laporan	-	-	-	1 Laporan	6,692,500	32,019,463	35,307,037	-	Fransiskus Xaverius Leu, SKM
					Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan Bidang Sosial dan Kependudukan	100%	-	-	-	100%	-	8,550,000	1,350,000	140,100,000	
					Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1 Dokumen	-	-	-	1 Laporan	-	8,550,000	1,350,000	140,100,000	Maximus Sabu, SE
					Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Kelitbangan yang direkomendasikan	100%	-	-	-	100%	-	159,847,500	146,952,500	193,200,000	
					Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	1 Dokumen	-	-	-	1 Laporan	-	159,847,500	146,952,500	193,200,000	Maximus Sabu, SE
					Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Inovasi dan Teknologi yang dihasilkan	100%	-	-	25%	75%	27,935,605	297,609,222	133,828,077	29,097,672	
					Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Kegiatan Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	-	-	-	1 Laporan	8,133,515	234,258,588	73,017,744	18,589,729	1. Saifun, ST 2. Yandiana Yumerti, SE
					Uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dana penerapan teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1 Laporan	-	-	-	1 Laporan	-	34,856,000	52,725,000	500,000	Agustina Dua Luju. S. STP
					Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	-	-	1 Laporan	-	19,802,090	12,515,301	825,000	247,609	Agustina Dua Luju. S. STP
					Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan	-	-	-	1 Laporan	-	15,979,333	7,260,333	9,760,334	Agustina Dua Luju. S. STP

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	TARGET				PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	HASIL YANG AKAN DICAPAI				ANGGARAN (Rp)				PENANGGUNGJAWAB
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	I	II	III	IV	
	Meningkatnya ketaatan Bapelitbang terhadap Perencanaan, evaluasi dan pengendalian	Persentase ketaatan Bapelitbang terhadap perencanaan, evaluasi dan pengendalian	100				100	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	100%					1,056,540,950	1,320,252,260	839,315,741	1,117,606,008	Dr. Marianus Andreas A. Anti, M.Si
								Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	-	-	-	2,000,000	3,025,000	3,188,800	6,785,000	Maria Any Adventyana, A.Md
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	-	-	-	2,000,000	3,025,000	3,188,800	6,785,000	Maria Any Adventyana, A.Md
	Meningkatnya Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN Badan Perencanaan dan Litbang Kab. Sikka	85				95.24	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	649,289,461	977,921,805	565,912,982	754,964,848	Yosef Atmayando Ivison,SS
								Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Bapelitbang Kab. Sikka yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya	38 Org	38 Orang	38 Orang	38 Orang	38 Orang	635,372,361	966,319,805	554,860,482	742,036,748	Yosef Atmayando Ivison,SS
								Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	52 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	12 Dokumen	14 Dokumen	13,917,100	11,602,000	11,052,500	12,928,100	Yosef Atmayando Ivison,SS
								Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan Administrasi kepegawaian yang dihasilkan	100%	100%	-	-	-	148,785,660	-	-	-	Anselma Ami Pau, S.I.Kom
								Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7 orang	7 Orang	-	-	-	148,785,660	-	-	-	Anselma Ami Pau, S.I. Kom
								Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan Administrasi Umum yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	38,647,700	53,706,920	62,837,400	80,247,030	Anselma Ami Pau, S.I.Kom
								Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi/Penerangan Kantor disediakan	1 Paket	1 Paket	-	-	-	1,982,100	1,751,000	2,373,400	2,739,450	Anselma Ami Pau, S.I. Kom
								Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	-	-	-	16,277,700	3,194,000	9,615,400	11,103,400	Anselma Ami Pau, S.I. Kom
								Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	1 Paket	1 Paket	-	1 Paket	1,677,300	1,791,600	5,573,600	5,387,500	Anselma Ami Pau, S.I. Kom
								Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	10,710,600	5,764,800	11,000,000	12,768,200	Anselma Ami Pau, S.I. Kom
								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	3 Laporan	5 Laporan	4 Laporan	3 Laporan	8,000,000	41,205,520	34,275,000	48,248,480	Anselma Ami Pau, S.I. Kom

TARGET				PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	HASIL YANG AKAN DICAPAI				ANGGARAN (Rp)				PENANGGUNGJAWAB
TW 1	TW 2	TW 3	TW 4				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	I	II	III	IV	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan	5 Unit	-	40%	-	60%	-	40,815,699	-	-	Anselma Ami Pau, S.I. Kom
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	-	2 unit	-	3 unit	-	40,815,699	-	-	Anselma Ami Pau, S.I. Kom
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100%	25%	25%	25%	25%	178,595,333	180,097,021	182,594,059	216,322,250	Anselma Ami Pau, S.I. Kom
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	42,390,693	45,951,181	45,682,419	65,139,210	Anselma Ami Pau, S.I. Kom
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	136,204,640	134,145,840	136,911,640	151,183,040	Anselma Ami Pau, S.I. Kom
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	39,222,796	64,685,815	24,782,500	59,286,880	Yosef Atmayando Ivison,SS
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit	6 Unit	5 Unit	4 Unit	4 Unit	13,395,296	22,906,865	19,000,000	33,355,780	Yosef Atmayando Ivison,SS
				Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 unit	1 Unit	-	1 Unit		2,300,000	978,100	270,000	3,773,450	Yosef Atmayando Ivison,SS
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	38 unit	-	1 Unit	18 Unit	19 Unit	21,241,500	37,500,850	2,144,500	12,111,650	Yosef Atmayando Ivison,SS
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	30 Unit	1 Unit	3 Unit	12 unit	14 Unit	2,286,000	3,300,000	3,368,000	10,046,000	Yosef Atmayando Ivison,SS

**PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA UTAMA
BADAN PERENCANAAN DAN LITBANG KABUPATEN SIKKA
TAHUN 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA PERHITUNGAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PROGRAM	ANGGARAN		
								PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Meningkatnya akuntabilitas perencanaan dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Nilai SAKIP		84,22	88,50	105.08	1. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Rp.1.617.773.620	Rp.1.395.639.900	86,27
		Persentase Dokumen Perencanaan, Pelaporan, Evaluasi dan Pengendalian Perangkat Daerah yang berkualitas (waktu, kesesuaian dengan tema dan target pembangunan)	$\frac{\text{Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang berkualitas}}{\text{Jml perangkat daerah}} \times 100$	100	100	100				
		Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKP	$\frac{\text{Jml Prog. RKP Tahun berkenaan}}{\text{Jml. Prog. RPJMD yang harus dilaksanakan}} \times 100$	100	97,52	97,52	2. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rp.977.703.700	Rp.869.444.926	88,93
		Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKP Kedalam APBD	$\frac{\text{Jml Prog. APBD Tahun berkenaan}}{\text{Jml. Prog. RKP yang harus dilaksanakan}} \times 100$	100	94,21	94,21				
		Persentase Partisipasi Masyarakat dalam proses perencanaan	$\frac{\text{Jml masyarakat yg hadir dlm Musrenbang}}{\text{Jumlah peserta Musrenbang}} \times 100$	96	100	100	3. PROGRAM PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Rp.4.333.810.299	Rp.4.079.245.853	94,13

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA PERHITUNGAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PROGRAM	ANGGARAN		
								PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)
2.	Meningkatnya kualitas hasil kajian kelitbangan	Persentase Hasil Kelitbangan dalam Kebijakan Penyusunan Daerah	$\frac{\text{Jml hasil kajian Kelitbangan yg ditindaklanjuti}}{\text{Jml hasil kajian Kelitbangan tahun berkenan}} \times 100$	100	100	100	4. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Rp.2.102.189.576	Rp.2.061.378.310	98,06

Jumlah Anggaran 2023

Rp.9.031.477.195,-

Jumlah Realisasi Anggaran 2023

Rp.8.405.708.989,-

Maumere, 18 Januari 2024

Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sikka,

Margaretha Movaldes D.M Bapa,ST, M.Eng.

Pembina Tingkat I

NIP.19761206 200012 2 003

**REALISASI RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
BAPELITBANG KABUPATEN SIKKA TAHUN 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI TARGET				PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	HASIL YANG DICAPAI				REALISASI ANGGARAN (Rp)				PENANGGUNGJAWAB	JADWAL PELAKSANAAN TRIWULAN					
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	I	II	III	IV		I	II	III	IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)		
1.	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja birokrasi	1. Nilai SAKIP	84.22 (A)			88.50 (A)		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	17,86%	45,83%	23,22	13,09%	333,390,300	415,905,190	353,259,650	293,084,760	Hilarius Rangga Mesa, S.Si	-					
		2. Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang berkualitas	100				100	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	-	98,18%	1,82%	-	279,291,300	355,774,090	173,076,770	149,564,800	Bertholomeus Baghi Tjeme, SE						
		3. Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD	100				97.52	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD		1 Berita Acara				1,149,200	20,780,900	-	-	Bertholomeus Baghi Tjeme, SE					
		4. Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam APBD	100				94.21	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota		1 Berita Acara				905,000	146,283,510	2,222,200.00	18,000,000.00	Bertholomeus Baghi Tjeme, SE					
		5. Persentase Partisipasi Masyarakat dalam proses perencanaan	96				100	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan		105 usulan				-	65,281,800	-	-	Bertholomeus Baghi Tjeme, SE					
									Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota		1 Dokumen	2 Dokumen		277,237,100	123,427,880	170,854,570	131,564,800	Bertholomeus Baghi Tjeme, SE					
									Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Buku	1 Dokumen	-	42,949,800	54,145,600	17,974,600	Alfred Zedekias, SE					
									Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	40,750,000	11,768,600	2,049,600	Alfred Zedekias, SE					
									Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota			1 Buku		-	2,199,800	42,377,000	15,925,000	Alfred Zedekias, SE					
									Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	2 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	54,099,000	17,181,300	126,037,280	125,545,360	Paskalia Carmelita Monasare, SP					
							Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	-	-	2 Laporan	-	-	600,000	100,417,380	63,768,860	Paskalia Carmelita Monasare, SP							
							Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	54,099,000	16,581,300	25,619,900	61,776,500	1. Paskalia Carmelita Monasare, SP 2. Alfred Zedekias, SE							

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	TARGET				PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	HASIL YANG AKAN DICAPAI				ANGGARAN (Rp)				PENANGGUNGJAWAB	JADWAL PELAKSANAAN TRIWULAN			
				TW1	TW2	TW3	TW4		TW1	TW2	TW3	TW4	I	II	III	IV		I	II	III	IV
								Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	-	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	-	2,516,600	13,441,400	Gonsaly Sisilia Djado Bala, S.Si				
								Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	-	2 Laporan	2 Laporan	-	3,800,000	-	-	6,267,200	Gonsaly Sisilia Djado Bala, S.Si				
								Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	2 Laporan	-	2 Laporan	-	-	5,432,300	4,200,000	37,944,200	Gonsaly Sisilia Djado Bala, S.Si				
								Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	15,54%	31,08%	53,38%	-	40,527,080	50,307,000	46,074,260	120,688,360	3. Theresia Maria Da Renya Sabeweo, ST, MT				
								Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	-	10 Dokumen	10 Dokumen	-	14,735,500	7,875,000	9,176,600	57,120,200	1. Blasius Blagin, ST 2. Maria Ernestin Sodin, ST				
								Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	-	10 Dokumen	10 Dokumen	-	2,546,600	10,851,600	3,774,160	2,440,000	1. Blasius Blagin, ST 2. Maria Ernestin Sodin, ST				
								Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	10 Laporan	-	10 Laporan	-	2,706,000	5,925,000	9,000,000	22,470,800	1. Blasius Blagin, ST 2. Maria Ernestin Sodin, ST				
								Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	-	68 Dokumen	68 Dokumen	-	15,188,980	5,912,300	7,773,500	9,973,860	Karolus Eduardus Suhana, S.Pt				
								Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	-	68 Laporan	68 Laporan	-	-	3,250,000	3,000,000	8,341,200	Karolus Eduardus Suhana, S.Pt				
								Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	68 Laporan	-	68 Laporan	-	-	-	2,150,000	19,006,300	Karolus Eduardus Suhana, S.Pt				
								Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Bidang Kewilayahan	-	-	34 Laporan	-	5,350,000	16,493,100	11,200,000	1,336,000	Karolus Eduardus Suhana, S.Pt				

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	TARGET				PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	HASIL YANG AKAN DICAPAI				ANGGARAN (Rp)				PENANGGUNGJAWAB	JADWAL PELAKSANAAN TRIWULAN			
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	I	II	III	IV		I	II	III	IV
2.	Meningkatnya kualitas hasil kajian kelitbang	Persentase Hasil Kelitbang dalam Penyusunan	100				100	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	-	-	25%	1	46,093,245	148,106,309	710,344,058	1,156,834,698	Fransiskus S. Nara Bata, S.T, M.Sc				
								Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	-	-	-	100%	27,904,310	53,035,659	445,376,308	415,722,520					
								Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	-	-	-	1 Laporan	11,665,810	11,079,200	23,120,233	27,451,800	Maximus Sabu, SE				
								Pengelolaan Data Kelitbang dan Peraturan	-	-	-	1 Laporan	9,546,000	20,935,900	416,815,075	347,643,300	Fransiskus Xaverius Leu, SKM				
								Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	-	-	-	1 Laporan	6,692,500	21,020,559	5,441,000	40,627,420	Fransiskus Xaverius Leu, SKM				
								Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	-	-	-	100%	-	-	-	142,345,060					
								Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	-	-	-	1 Laporan	-	-	-	142,345,060	Maximus Sabu, SE				
								Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	-	-	-	100%	-	-	23,650,000	475,690,960					
								Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	-	-	-	1 Laporan	-	-	23,650,000	475,690,960	Maximus Sabu, SE				
								Pengembangan Inovasi dan Teknologi	-	-	25%	75%	18,188,935	95,070,650	241,317,750	123,076,158					
								Penelitian, Pengembangan, dan Perekrasan di Bidang Teknologi dan Inovasi	-	-	-	1 Laporan	7,773,215	72,048,979	208,742,750	43,298,798	1. Saifun, ST 2.Yandiana Yumerti, SE				
								Uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dana penerapan teknologi	-	-	-	1 Laporan	-	1,120,000	31,775,000	54,571,660	Agustina Dua Luju. S. STP				
								Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	-	-	1 Laporan	-	10,415,720	21,901,671	800,000	-	Agustina Dua Luju. S. STP				
								Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	-	-	-	1 Laporan	-	-	-	25,205,700	Agustina Dua Luju. S. STP				

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	TARGET				PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	HASIL YANG AKAN DICAPAI				ANGGARAN (Rp)				PENANGGUNGJAWAB	JADWAL PELAKSANAAN TRIWULAN			
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	I	II	III	IV		I	II	III	IV
	Meningkatnya ketaatan Bapelitbang terhadap perencanaan, evaluasi dan pengendalian	Persentase ketaatan Bapelitbang terhadap perencanaan, evaluasi dan pengendalian	100				100	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					916,277,539	1,223,601,942	1,075,347,586	864,018,786	Drs. Marianus Andreas A. Anti, M.Si				
								Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	-	-	-	2,000,000	3,025,000	3,008,800	5,708,700	Maria Any Adventyana, A.Md				
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen	-	-	-	2,000,000	3,025,000	3,008,800	5,708,700	Maria Any Adventyana, A.Md				
	Meningkatnya Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN Badan Perencanaan dan Litbang Kab. Sikka	85				95.24	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	515,537,672	934,185,064	709,636,140	554,853,334	Yosef Atmayando Ivison,SS				
								Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang	38 Orang	38 Orang	38 Orang	501,491,372	923,685,064	696,660,740	542,958,634	Yosef Atmayando Ivison,SS				
								Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	13 Dokumen	13 Dokumen	12 Dokumen	14 Dokumen	14,046,300	10,500,000	12,975,400	11,894,700	Yosef Atmayando Ivison,SS				
								Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	-	-	-	148,785,660	-	-	-	Anselma Ami Pau, S.I.Kom				
								Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	7 Orang	-	-	-	148,785,660	-	-	-	Anselma Ami Pau, S.I. Kom				
								Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	38,781,300	47,881,920	104,222,580	39,077,040	Anselma Ami Pau, S.I.Kom				
								Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	-	-	-	1,982,100	1,751,000	2,284,500	2,827,800	Anselma Ami Pau, S.I. Kom				
								Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	-	-	-	16,348,800	1,359,000	17,184,500	5,295,400	Anselma Ami Pau, S.I. Kom				
								Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Paket	1 Paket	-	1 Paket	1,739,800	1,631,600	5,882,900	5,078,900	Anselma Ami Pau, S.I. Kom				
								Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	1 Paket	-	1 Paket	10,710,600	2,834,800	22,043,400	4,643,200	Anselma Ami Pau, S.I. Kom				
								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	5 Laporan	4 Laporan	3 Laporan	8,000,000	40,305,520	56,827,280	21,231,740	Anselma Ami Pau, S.I. Kom				

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	TARGET				PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	HASIL YANG AKAN DICAPAI				ANGGARAN (Rp)				PENANGGUNGJAWAB	JADWAL PELAKSANAAN TRIWULAN			
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	I	II	III	IV		I	II	III	IV
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik	Indeks Sarana dan Prasarana pelayanan publik	0.63				0.54	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	40%	-	60%	-	-	40,815,699	-	Anselma Ami Pau, S.I.Kom				
								Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	2 unit	-	3 unit	-	-	40,815,699		Anselma Ami Pau, S.I. Kom				
								Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25%	25%	25%	25%	171,879,841	178,830,913	182,724,560	211,404,574	Anselma Ami Pau, S.I.Kom				
								Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	39,787,101	47,870,773	54,322,820	57,128,694	Anselma Ami Pau, S.I. Kom				
								Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	132,092,740	130,960,140	128,401,740	154,275,880	Anselma Ami Pau, S.I. Kom				
								Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	39,293,066	59,679,045	34,939,807	52,975,138	Yosef Atmayando Ivison,SS				
								Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6 Unit	5 Unit	4 Unit	4 Unit	14,319,416	20,524,745	26,348,807	26,807,259	Yosef Atmayando Ivison,SS				
								Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya	1 Unit	-	1 Unit		2,300,000	601,100	377,000	3,842,500	Yosef Atmayando Ivison,SS				
								Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	1 Unit	18 Unit	19 Unit	21,377,650	35,913,200	3,596,000	12,031,000	Yosef Atmayando Ivison,SS				
								Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	3 Unit	12 unit	14 Unit	1,296,000	2,640,000	4,618,000	10,294,379	Yosef Atmayando Ivison,SS				

Maumere, 18 Januari 2024

Kepala Badan Perencanaan dan Litbang Kab. Sikka,

Margaretha Movaldes D.M Bapa,ST, M.Eng.

Pembina Tingkat I

NIP.19761206 200012 2 003

**PENGHARGAAN-PENGHARGAAN
BAPELITBANG KABUPATEN SIKKA TAHUN 2023**

Penghargaan sebagai Pemenang Lomba Gerak Jalan 10 KM dalam rangka Memperingati HUT RI ke-78 Tahun 2023



Penghargaan bagi Perangkat Daerah Terbaik I dalam Lomba Inovasi Daerah Tahun 2023



Penghargaan atas Inovasi Bapelitbang Kab. Sikka



Penghargaan atas Peran serta sebagai peserta Lomba Gerak Jalan 10 KM dalam rangka Memperingati HUT RI ke-78 Tahun 2023

PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Piagam Penghargaan
diberikan kepada

YOSEF ATMAYANDO IVISON, S.FIL
sebagai
Peserta Lomba Gerak Jalan
dalam rangka memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78
tingkat Kabupaten Sikka

Maumere, 15 Agustus 2023
Kepala Bapelitbang Kabupaten Sikka


Margaretha M. D. M. Bapa, ST, M.Eng.
Pembina Tingkat I
NIP. 19761206 200012 2 003

78
TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
MAJU

Penghargaan Lomba Taman Bapelitbang Kab. Sikka Tahun 2023

